



LAPORAN ATAS PENGELOLAAN
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA

TAHUN 2021
(AUDITED)

**PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
(Persero)**
**Jl. Letjen Suprapto No. 45 Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10520**
Telp. (021) 4241808, Faks. (021) 4203809
Website: www.taspen.co.id

24 Maret 2022

Nomor : SRT-84/DIR.1/032022
Sifat : Penting
Lampiran : -

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
C.q. Direktur Jenderal Anggaran
Di Jakarta

Hal : Laporan Manajemen atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang : "Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara", sebagai pengganti atas dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.02/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero),

bersama ini disampaikan Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited) sesuai Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Laporan disajikan dengan membandingkan realisasi dan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran periode Tahun 2021 (Audited) dengan periode Tahun 2020 (Audited) dalam beberapa aspek yaitu Aspek Operasional, Aspek Keuangan, Aspek

Investasi dan Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN serta peningkatan pelayanan dan penghargaan-penghargaan yang diperoleh PT TASPEN (Persero) dalam kurun waktu tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

PT Taspen (Persero)
Direksi

A.N.S. Kosasih
Direktur Utama

Tembusan Yth.
Direktur Jenderal Perbendaharaan

OT.02.01

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Bentuk dan sistematika Laporan Tahunan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (*Audited*) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya Nomor : 243/PMK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016, bahwa terhitung sejak Januari 2020 penyampaian laporan dilakukan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja akumulasi iuran pensiun (aplikasi SMART AIP). Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup aspek Operasional, aspek Keuangan, dan aspek Investasi.

Sehubungan dengan diterbitkannya PMK Nomor: 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPERN (Persero) dan PT Asabri (Persero), dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PT TASPERN (Persero) diimbau untuk membuka rekening yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN dan melakukan penyetoran Jasa Giro atas rekening tersebut ke Kas Negara, sebagai turunannya adalah Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015, tentang Tata cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja yang Dilaksanakan oleh PT TASPERN (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang terakhir diubah pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018. Dan Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut diatas, maka seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan Belanja Pensiun yang didanai dari APBN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan secara terpisah (Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN).

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TASPERN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TASPERN (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPERN (Persero) Tahun 2021 ditetapkan biaya satuan tahun 2021 sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021

Sebagai BUMN yang mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPERN terus berkomitmen kepada pesertanya untuk terus memberikan layanan terbaiknya dengan 4 (empat) Program perlindungan yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). TASPERN juga memberikan perlindungan kepada pegawai Non ASN dan Non PPPK yang bertugas pada Instansi Pemerintah sesuai UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP No 49 Tahun 2018. TASPERN akan

selalu memberikan layanan dan inovasi terbaiknya bagi Peserta baik itu ASN, Pejabat Negara dan Non ASN.

Pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam kurun hampir 2 tahun ini tidak mengurangi komitmen TASPen untuk tetap cepat dan tanggap menyesuaikan mekanisme pelayanan dan pola kerja karyawan di tengah pandemik COVID-19. Langkah sigap yang diambil bagi peserta adalah TASPen PESONA (Tanggap Andal Sehatkan Personil untuk Pelayanan Bebas Corona) dimana peserta dapat mengajukan klaim melalui layanan e-klaim pada website www.taspen.co.id yang dilanjutkan dengan verifikasi online serta pengambilan hak dapat dilakukan melalui ATM. Selain itu, layanan lainnya adalah TASPen Care untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan, serta TASPen Otentikasi untuk melakukan otentikasi mandiri melalui aplikasi smartphone. TASPen tetap melayani layanan tatap muka di kantor cabang, dengan jadwal yang sudah ditentukan dan pemberlakuan protokol pelayanan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan bagi peserta diantaranya penerapan 3M, pengecekan suhu tubuh, dan pengaturan jarak kursi duduk dan antrian.

Demikian Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (*Audited*) ini kami sampaikan sebagai informasi tentang kegiatan dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan iuran pensiun dan pembayaran pensiun. Semoga dapat memberikan manfaat, baik untuk perencanaan maupun pengendalian dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Program Pensiun PT TASPEN (Persero).....	1
B. Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Serta Ringkasan Hasil Pengelolaan Dana Pensiun	4
BAB II LAPORAN KEGIATAN	
A. Aspek Operasional	13
1. Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Pengembalian Nilai Tunai	13
2. Pembebatan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun.....	17
3. Sumber Daya Manusia	19
B. Aspek Keuangan	20
1. Dana Bersih.....	20
2. Penambahan Dana.....	26
3. Pengurangan Dana.....	29
4. Dana Bersih Akhir Periode.....	30
C. Aspek Investasi	32
1. Penempatan Investasi.....	32
2. Hasil Investasi	33
3. Beban Investasi	34
4. Realisasi Tingkat Pengembalian Hasil Investasi (Yield on investment/YOI).....	34
5. Karakteristik dan Risiko tiap Jenis Investasi.....	35
BAB III LAPORAN ADMINISTRATIF PROGRAM DANA BELANJA	
PENSIUN APBN	41
A. Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun.....	41
B. Penyelesaian Klaim	50
C. Jumlah Aset atau Liabilitas serta Sisa Dana Belanja Pensiun.....	50
D. Pembayaran Manfaat Pensiun APBN	53
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Pertimbangan dan Dukungan Kementerian Keuangan.....	55
B. Kesimpulan	57

DAFTAR TABEL

NO TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 1	Komposisi Sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS	2
Tabel 2	Laporan Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	5
Tabel 3	Penyelesaian Keluhan Pelanggan Januari sampai Desember 2021	6
Tabel 4	Ikhtisar Pengelolaan Program Pensiun Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	11
Tabel 5	Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	13
Tabel 6	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kantor Cabang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	14
Tabel 7	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun 31 Desember 2021	15
Tabel 8	Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun 31 Desember 2020	16
Tabel 9	BOP Pembayaran Manfaat Pensiun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	17
Tabel 10	BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	18
Tabel 11	Data Karyawan PT TASPERN (Persero) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	19
Tabel 12	Jumlah Karyawan Diperbantukan/Diperkerjakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	19
Tabel 13	Dana Bersih Akumulasi Iuran Program Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	20
Tabel 14	Nilai Deposito untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	21
Tabel 15	Nilai Surat Utang Negara untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	22
Tabel 16	Nilai Sukuk Pemerintah untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	23
Tabel 17	Nilai Sukuk Korporasi untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	23
Tabel 18	Nilai Reksadana untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	24
Tabel 19	Jumlah Penambahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	27

Tabel 20	Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	29
Tabel 21	Perubahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 22	Penempatan Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 23	Hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 24	Beban Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34
Tabel 25	Jumlah Penerimaan dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	41
Tabel 26	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 27	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun pada Kantor Cabang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	46
Tabel 28	Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun pada Kantor Cabang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 29	Jumlah Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Pensiun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	50
Tabel 30	Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	51
Tabel 31	Pembayaran Manfaat Pensiun APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	54

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1 Proporsi Penempatan Investasi 31 Desember 2021 32
2. Grafik 2 Proporsi Hasil Investasi 31 Desember 2021..... . 33
3. Grafik 3 Jumlah Penerima Manfaat Pensiun 31 Desember..... . 44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN PENDUKUNG

1.	Lampiran I	
	Laporan Dana Bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	61
2.	Lampiran II	
	Laporan Perubahan Dana Bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	62
3.	Lampiran III	
	Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	63
4.	Lampiran IV	
	Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Program Pensiun PT TASPER (Persero)

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, maka untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya termasuk didalamnya iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun tersebut oleh Pemerintah disimpan pada Bank milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Akumulasi Iuran Pensiun adalah kumpulan dana yang merupakan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara beserta hasil pengembangannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, maka iuran dana pensiun pegawai negeri yang selama ini dititipkan kepada Pemerintah dan ditempatkan pada bank-bank Pemerintah dialihkan penitipannya kepada PT TASPER (Persero) sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor:S-335/MK.02/2011 tanggal 20 Juni 2011, akumulasi iuran dana pensiun selain ditempatkan pada bank-bank Pemerintah juga dapat ditempatkan pada obligasi milik Pemerintah. Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.02/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 sebagai pengganti atas dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.02/2016, tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Selain mengelola Iuran Dana Pensiun PNS, mulai tahun 1987 Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun yang semula dilakukan melalui Kantor Kas Negara Departemen Keuangan kepada Perseroan secara bertahap.

- a. Pensiun di wilayah Bali, NTB, NTT terhitung 1 Januari 1987 melalui surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1.841 tanggal 13 Oktober 1986.
- b. Pensiun di wilayah Sumatera terhitung 1 Januari 1988 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-1402 tanggal 14 November 1987.

- c. Pensiun di wilayah Jawa dan Madura terhitung 1 Januari 1989 melalui Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor : 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-755 tanggal 27 September 1988.
- d. Pensiun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur terhitung 1 April 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan Undang-undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem *pay as you go*. Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN, sejak Tahun 1994 juga bersumber dari akumulasi Dana Pensiun PNS, namun sejak Tahun 2009 sepenuhnya (100%) bersumber dari APBN. Komposisi sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Sharing Pembayaran Manfaat Pensiun PNS

(Dalam Milliar Rupiah)

No	Periode	Sharing		Keterangan
		APBN	AIP PNS	
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	684,48 SK Menkeu No. 1204/MK.03/1993
2	April - Desember 1994	77,5%	22,50%	462,03 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
3	Januari - Desember 1995	77,5%	22,50%	761,00 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
4	Januari - Desember 1996	77,5%	22,50%	921,88 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
5	Januari - Maret 1997	77,5%	22,50%	1.106,78 Surat DJA No. S-1684/A/56/0394
6	April - Desember 1997	77%	23%	Surat DJA No. S-993/A/67/0297
7	Januari - Desember 1998	77%	23%	1.443,70 Surat DJA No. S-993/A/67/0297
8	Januari - Desember 1999	75%	25%	2.116,44 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
9	Januari - Desember 2000	75%	25%	1.750,61 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
10	Januari - Desember 2001	75%	25%	3.367,91 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
11	Januari - Desember 2002	75%	25%	3.394,75 Surat DJA No. S-3389/A/67/1999
12	Januari - Desember 2003	79%	21%	3.391,81 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
13	Januari - Desember 2004	79%	21%	3.368,83 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
14	Januari - Desember 2005	79%	21%	3.609,06 Surat Menkeu No. S-6878/MK.02/2002
15	Januari - Desember 2006	82,5%	17,50%	3.772,13 Surat Menkeu No. S-07/MK.02/2006
16	Januari - Desember 2007	85,5%	14,50%	3.386,23 Surat Menkeu No. S-03/MK.02/2007
17	Januari - Desember 2008	91%	9%	2.473,86 Surat Menkeu No. S-05/MK.02/2008
Jumlah		36.011,52		

Penggunaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak tanggal 31 Mei 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Kelompok Penerima Pensiun terdiri dari:

- a. Pensiun Pejabat Negara;
- b. Pensiun Hakim;
- c. Pensiun PNS Pusat;
- d. Pensiun PNS Daerah;
- e. Pensiun PNS Eks Pegadaian;
- f. Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI;
- g. Pensiun TNI/POLRI (eks ABRI yang pensiun sebelum tanggal 1 April 1989);
- h. Tunjangan Veteran;
- i. Dana Kehormatan Veteran;
- j. Tunjangan PKRI/KNIP.

Jenis Pensiun terdiri dari:

- a. Pensiun Sendiri;
- b. Pensiun Janda/Duda;
- c. Pensiun Yatim Piatu;
- d. Pensiun Orang Tua.

Hak-hak Peserta Program Pensiun ;

- 1) Pensiun Sendiri ($2,4\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{Masa Kerja}$) + Tunjangan ;
- 2) Pensiun Janda / Duda ($36\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan}$) ;
- 3) Pensiun Yatim / Piatu ($36\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan}$) ;
- 4) Pensiun Orang Tua ($20\% \times 72\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan}$) ;
- 5) Uang Duka Wafat (UDW) sebesar $3 \times \text{Penghasilan}$.

Bagi peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh hak berupa pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya.

Kewajiban Peserta dan Penerima Manfaat Program Pensiun :

- a. Peserta Aktif
 - Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
 - Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.
- b. Penerima Manfaat Program Pensiun
 - Melaporkan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPE(N Persero) dan PT Asabri (Persero). PMK tersebut mencabut PMK Nomor: 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPE(N Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi menggunakan unit cost.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513 /KMK.02.2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPE(N Persero) Tahun 2021 yang telah menetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan pembayaran manfaat

pensiun yang dilaksanakan PT TAS PEN (Persero) untuk tahun 2021 sebesar Rp 691.275.368.730,- dan Biaya Satuan untuk tahun 2021 sebesar Rp 19.984,- per penerima manfaat pensiun per bulan dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

B. Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara

1. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan

Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (*Audited*) ini disampaikan kepada Menteri Keuangan RI c.q Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya Nomor : 243/PMK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016.

2. Latar Belakang Pelaporan

Guna memenuhi kewajiban sebagai Badan Penyelenggara Dana Iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, maka PT TAS PEN (Persero) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Tahun 2021 (*Audited*) dalam rangka pengawasan atas pengadministrasian penitipan dana yang berasal dari iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

3. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting

a. Periode Pelaporan

Laporan Tahun 2021 (*Audited*) Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara ini merupakan informasi mengenai PT TAS PEN (Persero) dan penjabaran laporan kegiatan yang memuat aspek-aspek operasional, keuangan, investasi dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Kejadian Penting

Beberapa kejadian dan kegiatan penting sampai periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Total Aset dan Kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara

a) Total Aset Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Total Aset Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp189.832.340.793.717,- Jika dibandingkan dengan kondisi 31 Desember 2020 (*Audited*) mengalami pertumbuhan sebesar Rp18.106.375.726.609,- atau naik 10,54%.

Total Aset tersebut terdiri dari ;

- Aset Investasi sebesar Rp180.022.728.373.743,- meningkat sebesar Rp18.276.102.993.582,- atau naik sebesar 11,30% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 (*Audited*);
- Aset Bukan Investasi sebesar Rp9.809.612.419.974,- mengalami penurunan sebesar Rp169.727.266.973,- atau turun 1,70% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 (*Audited*).

b) Total Kewajiban

Total Kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar Rp192.822.962.471,- atau mengalami penurunan sebesar Rp87.399.069.110,- atau turun 31,19% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 (*Audited*).

c) Sedangkan pencapaian Total Dana Bersih yang merupakan selisih dari Total Aset dan Total Kewajiban pada 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp189.639.517.831.246,- atau naik sebesar Rp18.193.774.795.719,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,61% sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2

Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	Rupiah %
			Naik Turun
Aset Investasi	180.022.728.373.743	161.746.625.380.161	11,30
Aset Bukan Investasi	9.809.612.419.974	9.979.339.686.947	(1,70)
Total Aset	189.832.340.793.717	171.725.965.067.108	10,54
Kewajiban	192.822.962.471	280.222.031.581	(31,19)
Total Dana Bersih	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	10,61

Sumber : Accounting Division

2) Peningkatan Pelayanan

a) Upaya yang Telah dan Sedang Dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan guna meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan kepada peserta adalah dengan pengembangan *Delighted Customer Services* (DCS) dalam bentuk *high quality services* diantaranya melalui Layanan Klaim Otomatis, *E-Channel Delivery Services* dan TAS PEN PESONA “Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona” melalui layanan *e-klaim* TAS PEN, TAS PEN Care, dan aplikasi TAS PEN Otentikasi.

b) Sosialisasi KeTASPENan

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media online. Saat ini TAS PEN juga memaksimalkan penggunaan media sosial dalam melakukan sosialisasi, diantaranya sosialisasi TAS PEN PESONA, TAS PEN Mobile, TAS PEN otentikasi dan lainnya.

c) Penyelesaian Keluhan Pelanggan

Tabel 3
Penyelesaian Keluhan Pelanggan Januari sd Desember 2021

No (1)	Jenis Keluhan (2)	Jumlah Keluhan (3)	Tindak Lanjut Selesai (4)	Tindak Lanjut Belum Selesai (5)	Persentase Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
1	Penipuan	5	5	-	100%	Selesai
2	Pembayaran	1.595	1.595	-	100%	Selesai
3	Persyaratan	371	371	-	100%	Selesai
4	Kepesertaan	209	209	-	100%	Selesai
5	Alamat	90	90	-	100%	Selesai
6	Klaim	414	414	-	100%	Selesai
7	Mutasi	18	18	-	100%	Selesai
8	Lain-lain	1.440	1.440	-	100%	Selesai

d) Press Realease

Pelaksanaan Press Release yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021 diantaranya adalah meraih penghargaan The Best Brand Image in Mandatory Insurance Category, bersama dengan Pemkab Pasaman Barat Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Karyawan Non-ASN dan Non-PPPK, menyerahkan bantuan Mobil Ambulans Multifungsi Kepada Kementerian BUMN, bersinergi dengan Negara-Negara di Asia Terkait Pengelolaan ASN menyerahkan 4 Unit Ambulans, menerima Anugerah KORPRI Award 2021, Salurkan Bantuan kepada Korban Erupsi Gunung Semeru, MENPAN-RB Resmikan TASPEK Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung, menyalurkan bantuan Digitalisasi Pendidikan di Tangerang dan Rp110 Juta kepada Korban Erupsi Gunung Semeru.

e) Peningkatan Validasi dan Akurasi Data

Dalam rangka meningkatkan competitive advantage guna optimalisasi manajemen data peserta, PT TASPEK (Persero) melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- (1) Rekonsiliasi data peserta aktif dan penerimaan iuran dilakukan setiap bulan (Internal Pra Rekonsiliasi), rekonsiliasi dengan instansi peserta dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Validasi Data Peserta Aktif periode 31 Desember 2021 mencapai 99,62%.
- (2) Validasi Data Pensiun sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 99,99%.
- (3) Akurasi Data PNS Pusat dan PNS Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 99,97%.

C. Susunan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko dan Komite Investasi Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi, Komite Talenta Eksekutif dan Komite Aset Liabilitas.

1. Susunan Direksi PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN, Nomor: SK-23/MBU/01/2020 perihal Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Nomor: SK-37/MBU/01/2020 perihal Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Nomor: SK-217/MBU/06/2021 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka Susunan Anggota Direksi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	ANTONIUS N.S. KOSASIH	DIREKTUR UTAMA	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
2	MOHAMMAD JUFRI	DIREKTUR OPERASIONAL	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
3	PATAR SITANGGANG	DIREKTUR KEUANGAN	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
4	WAHYU TRI RAHMANTO	DIREKTUR PERENCANAAN DAN AKTUARIA	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
5	FEB SUMANDAR	DIREKTUR SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	17 Januari 2020	17 Januari 2020	SK-23/MBU/01/2020
6	RONY HANITYO APRINTO	DIREKTUR INVESTASI	30 Januari 2020	30 Januari 2020	SK-37/MBU/01/2020
7	DIYANTINI SOESILOWATI	DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO	30 Juni 2021	30 Juni 2021	SK-217/MBU/06/2021

2. Susunan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-226/MBU/09/2016 tanggal 09 September 2016 , Nomor: SK-118/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor: SK-203/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka Susunan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	SUHARDI ALIUS	KOMISARIS UTAMA	15 Juni 2020	15 Juni 2020	SK-203/MBU/06/2020
2	MARDIASMO	KOMISARIS INDEPENDEN	15 Juni 2020	15 Juni 2020	SK-203/MBU/06/2020
3	M. EDHIE PURNAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	29 Mei 2019	29 Mei 2019	SK-118/MBU/05/2019
4	LILIEK MAYASARI	KOMISARIS	29 Mei 2019	29 Mei 2019	SK-118/MBU/05/2019
5	BIMA HARIA WIBISANA	KOMISARIS	09 September 2016	09 September 2016	SK-226/MBU/09/2016
6	DWI WAHYU ATMAJI	KOMISARIS	09 September 2016	09 September 2016	SK-226/MBU/09/2016

3. Susunan Komite Audit PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP-13/DK-TASPEN/072020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit, maka susunan Komite Audit PT TAS PEN (Persero) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	MARDIASMO (Komisaris Independen)	KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TAS PEN/072020
2	LILIEK MAYASARI (Komisaris)	WAKIL KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TAS PEN/072020
3	HENNY IRNIAWAN	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TAS PEN/072020
4	DARIUS	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-13/DK-TAS PEN/072020

4. Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP-15/DK-TAS PEN/072020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan KEP-05/DK-TAS PEN/072021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, maka susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi PT TAS PEN (Persero) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	M. EDHIE PURNAWAN	KETUA	01 Juli 2020	13 Juli 2020	KEP-15/DK-TAS PEN/072020
2	BIMA HARIA WIBISANA	WAKIL KETUA	01 Juli 2020	13 Juli 2020	KEP-15/DK-TAS PEN/072020
3	SIGIT ROHMADI	ANGGOTA	01 Juli 2020	13 Juli 2020	KEP-15/DK-TAS PEN/072020
4	JANI ARJANTO	ANGGOTA	01 Juli 2020	13 Juli 2020	KEP-15/DK-TAS PEN/072020
5	ETTA RUSDIANA PUTRA	ANGGOTA	01 Juli 2021	01 Juli 2021	KEP-05/DK-TAS PEN/072021

5. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (KPMR)

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP-12/DK-TAS PEN/072020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (KPMR) PT TAS PEN (Persero) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT BERLAKU	TANGGAL SK	NO SK
1	SUHARDI ALIUS	KETUA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TAS PEN/072020
2	DWI WAHYU ATMAJI	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TAS PEN/072020
3	MUH. DARMIN AHMAD PELL	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TAS PEN/072020
4	AMRIZAL	ANGGOTA	01 Juli 2020	01 Juli 2020	KEP-12/DK-TAS PEN/072020

6. Komite Investasi

Berdasarkan Peraturan Direksi PT TAS PEN (Persero) Nomor: PD-19A/DIR/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Komite Investasi PT TAS PEN (Persero), susunan Komite Investasi PT TAS PEN (Persero) adalah sebagai berikut:

Ketua Sekretaris	: Direktur Investasi (merangkap anggota inti) : Fungsional Tertinggi pada Divisi Analis Investasi
Anggota Inti	: a) Direktur Keuangan b) Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko c) Direktur yang membawahi fungsi Aktuaria
Anggota Pendukung	: a) <i>Corporate Actuary</i> b) Unit Kerja Terkait (jika diperlukan) c) Konsultan Independen/ KJPP/ MI (jika diperlukan)

Jika terdapat kekosongan jabatan fungsional tertinggi atau terdapat fungsional tertinggi lebih dari 1 (satu) orang pada *Investment Analyst Division*, maka Ketua Komite Investasi berhak menunjuk Sekretaris Komite pada *Investment Analyst Division* yang direkomendasikan oleh *Investment Analyst Division Head*.

Pembentukan Komisi Investasi ini dimaksudkan agar dana yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan prinsip aman, hasil, likuid dan fleksibilitas.

7. Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEP (Persero) Nomor : KD-36/DIR/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi, susunan Komite PT TASPEP (Persero) adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur SDM dan Teknologi Informasi
Wakil Ketua	: Direktur Operasional
Sekretaris	: <i>Information Technology Division Head</i>
Anggota	: a) <i>Accounting Division Head</i> b) <i>Membership Division Head</i> c) <i>Services And Marketing Division Head</i> d) <i>Procurement&Maintenance Division Head</i> e) <i>Strategic Planning&Bus. Dev. Div Head</i> f) <i>Treasury Division Head</i> g) <i>Legal Division Head</i> , dan h) <i>Budgeting & Performance Analysis Desk Head</i>

Pembentukan Komite Pengarah Data dan Teknologi Informasi ini bertujuan untuk mencapai akurasi dan validitas data serta memastikan penerapan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan dapat tercapai sesuai rencana strategis (*Strategic Plan*) Perusahaan dan arahan Pemegang Saham.

8. Komite Talenta Eksekutif PT TASPEP (Persero)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEP (Persero) Nomor : KD- 7/DIR/2020 Tentang Komite Talenta Eksekutif PT TASPEP (Persero), susunan Komite Talenta Eksekutif PT TASPEP (Persero) adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Direktur SDM dan Teknologi Informasi
Anggota	: a) Direktur Operasi b) Direktur Keuangan c) Direktur Investasi d) Direktur Perencanaan dan Aktuaria e) Human Capital Division Head

Pembentukan Komite Talenta Eksekutif ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan strategis Manajemen Talenta, menetapkan program pengembangan bagi suksesor dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas, merumuskan serta menetapkan pergerakan karir talenta (*talent mobility*).

9. Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor : KD- 53/DIR/2020 Tentang Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero), susunan Komite Aset Liabilitas PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur yang membawahi unit kerja Manajemen Risiko
Sekretaris	: Pejabat Fungsional tertinggi pada Divisi Manajemen Risiko
Anggota Inti	: a) Direktur yang membawahi fungsi Investasi b) Direktur yang membawahi fungsi Perbendaharaan c) Direktur yang membawahi fungsi Aktuaria
Anggota Pendukung	: Unit kerja terkait (jika diperlukan)

Pembentukan Komite Aset Liabilitas ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mendukung kemampuan Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban kepada peserta sesuai jatuh tempo serta untuk mencapai tujuan keuangan Perusahaan dan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait aset dan liabilitas Perusahaan di dalam batasan-batasan dan toleransi risiko yang ditentukan oleh Perusahaan.

D. Ringkasan Pengelolaan Program Pensiun

Sebagai gambaran secara Ringkasan Pengelolaan Program Pensiun untuk periode 31 Desember 2021 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Ikhtisar Pengelolaan Program Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	SATUAN	RKA 2021	REALISASI		% Pencapaian 2021	% Naik Turun
			31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Program Pensiun						
1. Penerima Pensiun	orang	2.965.724	2.847.034	2.818.119	96,00	1,03
2. Penyelesaian Klaim	kejadian	547.864	678.857	508.681	123,91	33,45
3. Penyelesaian Klaim Pengembalian Nilai Tunai	kejadian	3.807	2.669	3.634	70,11	(26,55)
4. Pembayaran						
a. Pengembalian Nilai Tunai	Rp	154.214.852.326	105.667.168.768	134.027.175.066	68,52	(21,16)
b. Manfaat Pensiun (Dana APBN)	Rp	111.048.830.473.752	110.625.678.456.322	104.723.380.550.548	99,62	5,64
II Akumulasi Iuran Pensiun (AIP)						
1. Aset	Rp	184.780.360.873.904	189.832.340.793.717	171.725.965.067.108	102,73	10,54
2. Liabilitas	Rp	143.970.308.477	192.822.962.471	280.222.031.581	133,93	(31,19)
3. Penambahan	Rp	23.739.862.579.342	19.862.232.230.978	28.744.782.967.829	83,67	(30,90)
4. Pengurangan	Rp	1.723.865.917.411	1.675.129.975.259	8.727.509.252.954	97,17	(80,81)
5. Peningkatan (Penurunan) Dana Bersih	Rp	22.015.996.661.931	18.187.102.255.719	20.017.273.714.875	82,61	(9,14)
6. Dana Bersih Awal Periode	Rp	162.620.393.903.496	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	105,43	13,22
7. Dana Bersih Akhir Periode	Rp	184.636.390.565.427	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	102,71	10,61
III Dana Belanja Pensiun APBN						
1. Aset	Rp	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89
2. Liabilitas	Rp	8.323.170.293.985	7.944.998.422.616	7.691.160.709.202	95,46	3,30
3. Sisa Dana Belanja Pensiun Tahun Lalu	Rp	1.190.355.474.406	1.046.230.553.909	1.190.355.474.406	87,89	(12,11)
4. Penambahan	Rp	111.399.012.758.709	111.470.127.940.644	105.018.102.893.947	100,06	6,14
5. Pengurangan	Rp	111.399.012.758.709	111.559.214.045.696	105.162.227.814.444	100,14	6,08
6. Sisa Dana Belanja Pensiun	Rp	1.190.355.474.406	957.144.448.857	1.046.230.553.909	80,41	(8,51)
7. Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun	Rp	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89

Sumber : Accounting Division & Membership Division

1. Alamat Kantor Pusat PT TASPEN (Persero)

Kantor Pusat PT TASPEN (Persero) berkedudukan di Jl. Letjen Suprapto No. 45 Cempaka Putih - Jakarta Pusat 10520 Telp. (021) 4241808 Fax. (021) 4203809.

2. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Menjadi Tanggung Jawab PT TASPEN (Persero)

Dengan terbitnya laporan ini, dinyatakan bahwa isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Tahun 2021 ini merupakan tanggung jawab PT TASPEN (Persero) selaku Badan Penyelenggara dari Penitipan Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
TAHUN 2021(AUDITED)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A.N.S. Kosasih
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprapto No. 45 - Cempaka Putih Jakarta Pusat
10520 DKI Jakarta
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa ;

1. Direksi PT TASPEN (Persero) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Tahun 2021 (Audited) pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara;
2. Laporan keuangan Tahun 2021 (Audited) pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Semua informasi dalam laporan Tahun 2021 (Audited) pengelolaan akumulasi iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara telah dimuat secara lengkap dan benar.

Demikian peryataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Maret 2022


A.N.S. Kosasih
Direktur Utama

BAB II LAPORAN KEGIATAN

Laporan Akumulasi Iuran PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan selama Januari sampai dengan Desember 2021 yang memuat penjabaran aspek-aspek operasional, keuangan, dan investasi. Untuk dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut, berikut ini disajikan laporan kegiatan dan realisasi yang dibabarkan dalam aspek-aspek tersebut diatas.

A. ASPEK OPERASIONAL

1. Jumlah Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Pengembalian Nilai Tunai

Realisasi penyelesaian klaim Pengembalian Manfaat Nilai Tunai yang dibayarkan melalui Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) pada 31 Desember 2021 sebanyak 2.669 kejadian atau mencapai 70,11% dari RKA Tahun 2021 dengan nilai pembayarannya sebesar Rp105.667.168.768,-. Jika dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 26,55% atau sebanyak 965 kejadian dan nilai pembayaran mengalami penurunan sebesar Rp28.360.006.298,- atau mengalami penurunan sebesar 21,16%.

Jumlah penyelesaian pengembalian nilai tunai dan realisasi pembayaran pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
Pengembalian Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	3.807	154.214.852.326	2.669	105.667.168.768	3.634	134.027.175.066	70,11	68,52	(26,55)	(21,16)
JUMLAH	3.807	154.214.852.326	2.669	105.667.168.768	3.634	134.027.175.066	70,11	68,52	(26,55)	(21,16)

Sumber : Accounting Division & Membership Division

Rekapitulasi jumlah penyelesaian klaim dan jumlah pembayaran manfaat pengembalian nilai tunai pada masing-masing Kantor Cabang Utama/Cabang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

*Bab II - Laporan Kegiatan -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)*

Tabel 6
Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kantor Cabang
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	KANTOR CABANG	BA	31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)		<i>Kejadian dan Rupiah</i>
			Jumlah Penerima Orang	Jumlah Pembayaran Rp	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	JAKARTA	100	325	10.438.067.839	241	8.790.409.574	
2	BANDAR LAMPUNG	101	26	975.121.287	78	2.422.074.596	
3	BENGKULU	102	42	1.820.967.122	121	4.253.333.597	
4	PALEMBANG	103	68	2.911.971.794	67	2.399.592.747	
5	PALANGKARAYA	104	55	1.674.126.646	70	2.651.949.517	
6	PONTIANAK	105	51	2.087.481.700	94	3.533.386.400	
7	PANGKAL PINANG	106	32	942.495.098	52	1.855.492.663	
8	TANGERANG	107	35	1.569.303.065	31	1.080.795.563	
9	TARAKAN	108	8	218.366.785	38	982.874.898	
10	JAKARTA SELATAN	109	39	997.199.361	47	1.419.605.512	
11	LUBUK LINGGAU	110	19	828.757.224	27	887.734.762	
12	MEDAN	200	75	3.056.775.700	103	4.019.905.400	
13	BANDA ACEH	201	32	1.103.988.000	76	2.951.369.889	
14	PEMATANG Siantar	202	45	1.810.842.499	77	3.474.080.712	
15	BUKITTINGGI	203	17	645.580.900	23	741.892.500	
16	PADANG	204	27	1.107.354.091	23	780.274.059	
17	PEKANBARU	205	90	3.870.875.403	124	5.376.602.641	
18	JAMBI	206	49	1.900.673.300	60	2.299.096.430	
19	TANJUNG PINANG	207	34	1.226.210.854	50	1.655.315.804	
20	LHOKSEUMAWE	208	25	1.157.385.500	56	2.387.824.999	
21	KEPULAUAN NIAS	209	10	372.729.133	18	669.205.733	
22	BANDUNG	300	71	2.440.666.235	81	2.867.915.899	
23	BOGOR	301	67	3.052.937.899	68	2.822.010.004	
24	TASIKMALAYA	302	21	922.505.971	55	1.994.819.258	
25	CIREBON	303	8	180.460.500	49	1.994.633.700	
26	SERANG	304	35	1.646.786.200	44	1.512.925.400	
27	DEPOK	305	20	764.798.600	22	651.857.145	
28	BEKASI	306	22	601.040.874	55	2.044.049.799	
29	SEMARANG	400	67	3.145.625.262	83	3.157.396.585	
30	PURWOKERTO	401	32	934.347.229	51	1.199.750.576	
31	SURAKARTA	402	56	2.086.562.823	65	2.186.139.189	
32	YOGYAKARTA	403	23	689.036.998	45	1.450.904.255	
33	PEKALONGAN	404	36	1.496.494.901	69	2.901.684.233	
34	SURABAYA	500	98	4.157.866.626	107	4.086.635.227	
35	MALANG	501	60	2.518.533.000	93	3.916.727.436	
36	MADIUN	502	34	1.476.943.275	46	1.471.394.965	
37	KEDIRI	503	80	4.371.656.800	51	1.779.377.000	
38	JEMBER	504	44	2.247.630.561	51	1.588.773.279	
39	BANJARMASIN	505	42	1.460.256.026	85	2.804.104.500	
40	SAMARINDA	506	91	3.525.264.682	93	3.106.087.526	
41	ENDE	507	27	770.364.800	34	1.131.077.500	
42	PAMEKASAN	508	30	1.321.276.600	25	1.219.526.400	
43	MAKASSAR	600	79	3.332.188.425	115	4.350.405.592	
44	MANADO	601	70	3.184.820.137	75	3.013.367.000	
45	PALU	602	57	2.478.741.205	79	2.624.946.798	
46	KENDARI	603	26	1.174.389.400	79	2.963.448.160	
47	AMBON	604	17	632.435.000	48	1.896.350.800	
48	JAYAPURA	605	53	2.023.017.480	96	3.598.944.491	
49	GORONTALO	606	39	1.618.780.207	56	2.237.289.649	
50	TERNATE	607	20	758.080.455	32	1.009.016.228	
51	MAMUJU	608	21	759.257.200	29	961.409.600	
52	MANOKWARI	609	25	866.128.800	43	1.761.872.200	
53	PALOPO	610	27	1.105.897.824	38	1.533.611.724	
54	BONE	611	38	1.756.813.054	26	1.052.056.500	
55	DENPASAR	700	43	1.955.143.061	42	1.467.768.131	
56	KUPANG	701	45	1.809.593.946	60	2.471.725.200	
57	MATARAM	702	41	1.684.553.411	68	2.564.355.121	
Jumlah			2.669	105.667.168.768	3.634	134.027.175.066	

Sumber : Accounting Division & Membership Division

*Bab II - Laporan Kegiatan -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)*

Tabel 7
Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun
Per 31 Desember 2021

NO	KANTOR CABANG	PNS PUSAT	PNS DO	PNS PERBANTUAN	PEJABAT NEGARA	PENGEMBALIAN SP3IP	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	JAKARTA	6.589.723.806	3.560.361.192	347.865.241	-	(59.882.400)	10.438.067.839
2	BANDAR LAMPUNG	273.469.390	701.651.897	-	-	-	975.121.287
3	BENGKULU	439.324.555	1.381.642.567	-	-	-	1.820.967.122
4	PALEMBANG	897.971.798	2.013.999.996	-	-	-	2.911.971.794
5	PALANGKARAYA	175.481.200	1.498.645.446	-	-	-	1.674.126.646
6	PONTIANAK	395.008.500	1.692.473.200	-	-	-	2.087.481.700
7	PANGKAL PINANG	86.826.022	855.669.076	-	-	-	942.495.098
8	TANGERANG	571.180.122	998.122.943	-	-	-	1.569.303.065
9	TARAKAN	89.222.800	129.143.985	-	-	-	218.366.785
10	JAKARTASELATAN	686.953.242	310.246.119	-	-	-	997.199.361
11	LUBUK LINGGAU	-	828.757.224	-	-	-	828.757.224
12	MEDAN	602.786.500	2.453.989.200	-	-	-	3.056.775.700
13	BANDA ACEH	115.203.500	1.021.169.700	-	-	(32.385.200)	1.103.988.000
14	PEMATANG SINTAR	16.905.800	1.793.936.699	-	-	-	1.810.842.499
15	BUKITTINGGI	120.442.200	525.138.700	-	-	-	645.580.900
16	PADANG	165.847.431	941.506.660	-	-	-	1.107.354.091
17	PEKANBARU	304.059.512	3.566.815.891	-	-	-	3.870.875.403
18	JAMBI	348.662.400	1.552.010.900	-	-	-	1.900.673.300
19	TANJUNG PINANG	433.231.300	702.755.854	90.223.700	-	-	1.226.210.854
20	LHOKSEUMAWE	157.746.600	1.016.937.900	-	-	(17.299.000)	1.157.385.500
21	KEPULAUAN NIAS	-	372.729.133	-	-	-	372.729.133
22	BANDUNG	860.402.991	1.580.263.244	-	-	-	2.440.666.235
23	BOGOR	911.021.382	2.188.524.317	-	-	(46.607.800)	3.052.937.899
24	TASIKMALAYA	52.023.278	870.482.693	-	-	-	922.505.971
25	CIREBON	40.369.600	140.090.900	-	-	-	180.460.500
26	SERANG	200.993.300	1.445.792.900	-	-	-	1.646.786.200
27	DEPOK	471.134.300	293.664.300	-	-	-	764.798.600
28	BEKASI	187.145.044	458.847.330	-	-	(44.951.500)	601.040.874
29	SEMARANG	444.353.300	2.701.271.962	-	-	-	3.145.625.262
30	PURWOKERTO	339.159.835	589.606.794	-	5.580.600	-	934.347.229
31	SURAKARTA	637.953.823	1.448.609.000	-	-	-	2.086.562.823
32	YOGYAKARTA	247.877.749	368.889.649	72.269.600	-	-	689.036.998
33	PEKALONGAN	284.723.200	1.211.771.701	-	-	-	1.496.494.901
34	SURABAYA	935.652.700	3.126.868.426	95.345.500	-	-	4.157.866.626
35	MALANG	563.686.400	1.954.846.600	-	-	-	2.518.533.000
36	MADIUN	219.388.833	1.257.554.442	-	-	-	1.476.943.275
37	KEDIRI	409.944.700	3.961.712.100	-	-	-	4.371.656.800
38	JEMBER	283.135.800	1.964.494.761	-	-	-	2.247.630.561
39	BANJARMASIN	341.514.326	1.118.741.700	-	-	-	1.460.256.026
40	SAMARINDA	386.967.100	3.138.297.582	-	-	-	3.525.264.682
41	ENDE	33.299.500	737.065.300	-	-	-	770.364.800
42	PAMEKASAN	204.328.300	1.116.948.300	-	-	-	1.321.276.600
43	MAKASSAR	731.462.025	2.600.726.400	-	-	-	3.332.188.425
44	MANADO	378.563.200	2.770.060.637	36.196.300	-	-	3.184.820.137
45	PALU	183.677.100	2.295.064.105	-	-	-	2.478.741.205
46	KENDARI	147.045.300	1.027.344.100	-	-	-	1.174.389.400
47	AMBON	78.754.900	553.680.100	-	-	-	632.435.000
48	JAYAPURA	361.105.037	1.661.912.443	-	-	-	2.023.017.480
49	GORONTALO	221.882.803	1.396.897.404	-	-	-	1.618.780.207
50	TERNATE	268.697.466	489.382.989	-	-	-	758.080.455
51	MAMUJU	220.854.200	538.403.000	-	-	-	759.257.200
52	MANOKWARI	115.096.200	751.032.600	-	-	-	866.128.800
53	PALOPO	125.110.100	980.787.724	-	-	-	1.105.897.824
54	BONE	399.780.300	1.357.032.754	-	-	-	1.756.813.054
55	DENPASAR	291.217.350	1.622.860.611	41.065.100	-	-	1.955.143.061
56	KUPANG	57.242.500	1.708.135.346	44.216.100	-	-	1.809.593.946
57	MATARAM	373.062.378	1.288.099.233	23.391.800	-	-	1.684.553.411
Jumlah		24.478.672.998	80.633.467.729	750.573.341	5.580.600	(201.125.900)	105.667.168.768

Sumber : Accounting Division

Bab II - Laporan Kegiatan -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)

Tabel 8
Pembayaran Manfaat Pengembalian Nilai Tunai Per Kelompok Pensiun
Per 31 Desember 2020

NO	KANTOR CABANG	PNS PUSAT	PNS DO	PNS PERBANTUAN	PEJABAT NEGARA	PENGEMBALIAN SP3IP	Rupiah JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JAKARTA	6.220.629.803	2.317.795.474	251.984.297	-	-	8.790.409.574
2	BANDAR LAMPUNG	632.802.162	1.770.946.834	18.325.600	-	-	2.422.074.596
3	BENGKULU	1.734.596.490	2.518.737.107	-	-	-	4.253.333.597
4	PALEMBANG	682.632.618	1.716.960.129	-	-	-	2.399.592.747
5	PALANGKARAYA	507.204.981	2.144.744.536	-	-	-	2.651.949.517
6	PONTIANAK	312.461.800	3.220.924.600	-	-	-	3.533.386.400
7	PANGKAL PINANG	368.969.842	1.486.522.821	-	-	-	1.855.492.663
8	TANGERANG	507.540.307	500.481.094	72.774.162	-	-	1.080.795.563
9	TARAKAN	34.850.872	948.024.026	-	-	-	982.874.898
10	JAKARTA SELATAN	1.276.199.412	143.406.100	-	-	-	1.419.605.512
11	LUBUK LINGGAU	35.273.045	852.461.717	-	-	-	887.734.762
12	MEDAN	853.487.500	3.166.417.900	-	-	-	4.019.905.400
13	BANDA ACEH	738.296.462	2.213.073.427	-	-	-	2.951.369.889
14	PEMATANG Siantar	185.251.211	3.288.829.501	-	-	-	3.474.080.712
15	BUKITTINGGI	137.801.600	604.090.900	-	-	-	741.892.500
16	PADANG	176.207.505	604.066.554	-	-	-	780.274.059
17	PEKANBARU	476.012.141	4.900.590.500	-	-	-	5.376.602.641
18	JAMBI	423.605.187	1.875.491.243	-	-	-	2.299.096.430
19	TANJUNG PINANG	117.671.395	1.490.219.994	47.424.415	-	-	1.655.315.804
20	LHOKSEUMAWE	274.683.100	2.113.141.899	-	-	-	2.387.824.999
21	KEPULAUAN NIAS	-	669.205.733	-	-	-	669.205.733
22	BANDUNG	1.013.656.901	1.854.258.998	-	-	-	2.867.915.899
23	BOGOR	1.163.387.914	1.658.622.090	-	-	-	2.822.010.004
24	TASIKMALAYA	334.871.841	1.659.947.417	-	-	-	1.994.819.258
25	CIREBON	464.020.300	1.530.613.400	-	-	-	1.994.633.700
26	SERANG	220.361.100	1.292.564.300	-	-	-	1.512.925.400
27	DEPOK	437.735.445	214.121.700	-	-	-	651.857.145
28	BEKASI	407.064.547	1.636.985.252	-	-	-	2.044.049.799
29	SEMARANG	815.206.582	2.342.190.003	-	-	-	3.157.396.585
30	PURWOKERTO	264.114.444	928.316.132	-	7.320.000	-	1.199.750.576
31	SURAKARTA	500.038.469	1.642.820.720	43.280.000	-	-	2.186.139.189
32	YOGYAKARTA	897.802.063	553.102.192	-	-	-	1.450.904.255
33	PEKALONGAN	456.858.826	2.444.825.407	-	-	-	2.901.684.233
34	SURABAYA	637.871.681	3.448.763.546	-	-	-	4.086.635.227
35	MALANG	632.828.297	3.283.899.139	-	-	-	3.916.727.436
36	MADIUN	154.057.610	1.382.995.655	-	-	-65.658.300	1.471.394.965
37	KEDIRI	160.254.700	1.619.122.300	-	-	-	1.779.377.000
38	JEMBER	494.091.900	1.085.024.479	9.656.900	-	-	1.588.773.279
39	BANJARMASIN	443.837.600	2.360.266.900	-	-	-	2.804.104.500
40	SAMARINDA	569.435.800	2.483.772.426	48.085.800	4.793.500	-	3.106.087.526
41	ENDE	73.939.800	1.057.137.700	-	-	-	1.131.077.500
42	PAMEKASAN	15.695.600	1.203.830.800	-	-	-	1.219.526.400
43	MAKASSAR	1.440.315.406	2.876.771.021	33.319.165	-	-	4.350.405.592
44	MANADO	804.444.100	2.184.205.800	24.717.100	-	-	3.013.367.000
45	PALU	249.139.349	2.375.807.449	-	-	-	2.624.946.798
46	KENDARI	514.086.000	2.400.771.560	48.590.600	-	-	2.963.448.160
47	AMBON	583.087.600	1.313.263.200	-	-	-	1.896.350.800
48	JAYAPURA	1.282.791.491	2.247.011.400	69.141.600	-	-	3.598.944.491
49	GORONTALO	485.683.789	1.747.934.724	-	3.671.136	-	2.237.289.649
50	TERNATE	246.533.219	762.483.009	-	-	-	1.009.016.228
51	MAMUJU	100.385.700	861.023.900	-	-	-	961.409.600
52	MANOKWARI	31.640.100	1.571.204.400	159.027.700	-	-	1.761.872.200
53	PALOPO	74.704.627	1.458.907.097	-	-	-	1.533.611.724
54	BONE	71.585.300	980.471.200	-	-	-	1.052.056.500
55	DENPASAR	559.708.323	908.059.808	-	-	-	1.467.768.131
56	KUPANG	120.377.900	2.305.662.300	45.685.000	-	-	2.471.725.200
57	MATARAM	467.007.625	2.097.347.496	-	-	-	2.564.355.121
Jumlah		32.884.799.382	100.320.237.009	872.012.339	15.784.636	(65.658.300)	134.027.175.066

Sumber : Accounting Division

2. Pembebanan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pensiun

Akun ini merupakan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) terkait dengan Pembayaran Manfaat Pensiun dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun yang terdiri dari:

a. BOP Pembayaran Manfaat Pensiun

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TAS PEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TAS PEN (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TAS PEN (Persero) Tahun 2021 ditetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp691.275.368.730,- dengan biaya satuan Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun PNS pada 31 Desember 2021 sebesar Rp682.357.077.280,- Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.928.096.876,- atau naik 3,95%. Realisasi BOP Pembayaran Manfaat Pensiun pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
BOP Pembayaran Manfaat Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik/Turun
BOP Pembayaran Manfaat Pensiun	682.357.077.280	656.428.980.404	3,95
JUMLAH	682.357.077.280	656.428.980.404	3,95

Adapun rincian BOP Pembayaran Manfaat Pensiun sebagai berikut :

Bulan	Penerima Pensiun (Orang)
Januari	2.815.502
Februari	2.828.900
Maret	2.821.133
April	2.831.475
Mei	2.840.288
Juni	2.845.269
Juli	2.857.043
Agustus	2.861.703
September	2.869.139
Okttober	2.870.914
November	2.856.770
Desember	2.847.034
Total	34.145.170

BOP Tahun 2021 : Rp19.984,- x 34.145.170

682.357.077.280

b. BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun

BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Program THT yang dihitung berdasarkan rumus 6,7% dari hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dikurangi dengan Beban Investasi per periode. Adapun realisasi BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)	
	Rp	Rp	(2)	(3)
(1)				
Hasil Investasi				
1. Bunga Deposito		1.923.401.178.367		2.157.464.931.291
2. Bunga Obligasi :				
- Surat Utang Negara	6.079.897.828.907		5.484.855.725.894	
- Obligasi Korporasi	1.500.060.305.559		1.644.893.305.509	
3. Imbal Hasil Sukuk				
- Sukuk Pemerintah	1.875.380.161.423		1.651.900.296.837	
- Sukuk Korporasi	8.810.939.291		9.075.000.015	
4. Dividen Penyertaan	2.205.450.000		2.301.065.000	
5. Bunga Medium Term Notes	2.579.500.000		4.294.583.333	
6. Dividen Saham	149.810.228.011		194.043.496.174	
7. Dividen Reksadana	55.350.768.700		53.600.394.882	
8. Imbal Hasil Reksadana	136.040.019.252		132.909.526.183	
9. Pendapatan Investasi Lainnya	1.333.281.110		43.200.000	
10. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi :				
- Laba (Rugi) Pelepasan Saham	209.770.407.046		362.913.035.803	
- Laba (Rugi) Pelepasan Obligasi	795.828.728.822		883.642.897.923	
- Laba (Rugi) Pelepasan Reksadana	43.381.153.370		188.602.602.843	
- Laba (Rugi) Pelepasan Sukuk	10.451.470.636		1.990.000.000	
- Laba (Rugi) Pelepasan MTN			30.000.000	
- Laba (Rugi) Pelepasan RDPT	3.756.421.509			
Jumlah Hasil Investasi	12.798.057.842.003		12.772.560.061.687	
Beban Investasi		(29.255.670.375)		(50.178.453.664)
Hasil Investasi - Beban Investasi	12.768.802.171.628		12.722.381.608.023	

Sumber : Accounting Division

Penggantian BOP Tahun 2021	6,7%	6,7%	12.768.802.171.628	=	855.509.745.499
Penggantian BOP Tahun 2020			12.722.381.608.023	=	852.399.567.738

BOP Pengelolaan AIP PNS pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp855.509.745.499,- dan Rp852.399.567.738,- Peningkatan realisasi BOP Pengelolaan AIP PNS Tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya realisasi *gain* pelepasan investasi karena memanfaatkan momentum pasar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mulai membaik walaupun masih terimbas oleh Pandemi Covid-19 yang tergambar pada IHSG dan indeks obligasi.

Perhitungan BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PT TASPEN (Persero) sampai dengan kondisi 31 Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 1.657 orang yang tersebar pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang seluruh Indonesia serta beberapa karyawan yang diperbantukan/ dipekerjakan di anak perusahaan PT TASPEN (Persero). Jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada 31 Desember 2020 sebanyak 1.569 orang, maka pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebanyak 88 orang dikarenakan penerimaan karyawan baru sebanyak 277 orang dan karyawan yang mengalami PMK (Pensiun, Meninggal, Keluar) sebanyak 189 orang.

Data karyawan PT TASPEN (Persero) dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 11
Data Karyawan PT TASPEN (Persero)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No (1)	Uraian (2)	Jumlah SDM	
		31 Desember 2021 (Audited) (3)	31 Desember 2020 (Audited) (4)
1	Kantor Pusat	425	387
2	Diperbantukan/Dipekerjakan	11	16
3	Kantor Cabang	1.221	1.166
JUMLAH		1.657	1.569
<i>Sumber : Human Capital Division</i>			

Tabel 12
Jumlah Karyawan Diperbantukan/Dipekerjakan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020

No (1)	UNIT KERJA (2)	Jumlah SDM	
		31 Desember 2021 (Audited) (3)	31 Desember 2020 (Audited) (4)
1	TASPEN Properti	0	0
2	TASPEN Life	3	5
3	DP Taspen	4	5
4	Bank MANTAP	3	2
5	TSP Abadi Sentosa	0	0
6	PT RSP	1	2
7	Lainnya	0	2
JUMLAH		11	16
<i>Sumber : Human Capital Division</i>			

B. ASPEK KEUANGAN

1. Dana Bersih

Dana Bersih akumulasi iuran pensiun pada 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp189.639.517.831.246,- mencapai 102,71% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp18.193.774.795.719,- atau naik 10,61%. Rincian Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun (6=3/4)
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1. ASET					
INVESTASI					
Deposito	18.089.980.526.840	33.307.100.000.000	25.330.800.000.000	184,12	31,49
Obligasi :					
- Surat Utang Negara	70.592.872.964.187	82.259.363.927.530	79.360.369.199.668	116,53	3,65
- Obligasi Korporasi	30.234.951.935.437	17.926.389.870.080	19.762.733.493.240	59,29	(9,29)
Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	24.341.141.446.052	30.704.929.291.285	23.560.026.904.715	126,14	30,33
- Sukuk Korporasi	3.283.831.887.457	105.702.473.250	82.583.442.400	3,22	27,99
Medium Term Notes	631.771.929.630	-	30.251.976.000	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191.087	7.403.164.296.669	5.314.367.023.678	49,73	39,30
Saham	9.490.244.031.973	6.224.226.884.750	6.234.553.109.300	65,59	(0,17)
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000.000	48.093.000.000	-	0,65
Penyertaan Langsung	2.887.659.000.000	2.043.444.630.179	2.022.847.231.160	70,76	1,02
Jumlah Investasi	174.438.480.912.663	180.022.728.373.743	161.746.625.380.161	103,20	11,30
ASET BUKAN INVESTASI					
Kas dan Bank :					
- Kas	3.093.992	693.660	1.019.460	22,42	(31,96)
- Bank	2.359.018.163	2.414.482.223	2.717.894.257	102,35	(11,16)
Piutang Iuran	44.062.394.550	35.280.505.734	25.008.884.789	80,07	41,07
Piutang Hasil Investasi	1.950.180.087.763	2.055.523.066.863	1.929.802.157.104	105,40	6,51
Piutang Pelepasan Investasi	-	-	3.602.316.977	-	(100,00)
Piutang Nilai Investasi	86.236.178.703	-	-	-	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	7.363.678.773.800	93,21	2,74
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub	52.240.968.132	40.319.777.315	-	77,18	-
Piutang Lain-lain	61.839.986.263	96.390.244.072	17.707.582.798	155,87	444,34
Aset Lancar Lainnya	-	-	1.697.237.500	(100,00)	
Aset Operasional :					
Tanah	-	-	513.077.996.800	-	(100,00)
Bangunan	-	-	213.181.566.039	-	(100,00)
Kendaraan	132.900.000	132.900.000	132.900.000	100,00	-
Komputer	4.432.131.954	2.599.562.890	3.461.592.575	58,65	(24,90)
Inventaris Kantor	10.814.739.242	8.345.215.454	9.143.202.314	77,17	(8,73)
Aset Operasional Lain :					
- Aset Tetap Tidak Digunakan	-	-	306.270.823	50,24	(40,68)
- Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual	361.613.523	181.679.736	55.342.700	-	(57,97)
- Aset Tidak Berwujud	-	23.262.700	10.009.537.225	100,00	-
- Hak Guna Bangunan	10.009.537.225	10.009.537.225	30.388.630.149	90,81	(9,19)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	30.388.630.149	(34.514.695.663)	(144.633.218.363)	125,99	(76,14)
Jumlah Aset Bukan Investasi	10.341.879.961.242	9.809.612.419.974	9.979.339.686.947	94,85	(1,70)
Jumlah Aset	184.780.360.873.904	189.832.340.793.717	171.725.965.067.108	102,73	10,54
2. KEWAJIBAN					
Utang Iuran	356.882.427	1.058.437.067	323.255.954	296,58	227,43
Utang Klaim	-	290.273.600	-	-	
Utang Perolehan Investasi	-	-	35.562.483.388	-	(100,00)
Utang Pajak	-	251.040.267	336.674.655	-	(25,44)
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	-	75.350.000	-	-	
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	109.432.436.580	89.089.748.065	-	22,83
Pendapatan Diterima Dimuka	5.913.173.283	-	3.331.124.550	-	(100,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	662.424.650	-	-	
Utang Kepada Program THT	137.700.252.767	80.683.129.741	151.208.875.203	58,59	(46,64)
Utang Lain-lain	-	369.870.566	369.869.766	-	0,00
Jumlah Kewajiban	143.970.308.477	192.822.962.471	280.222.031.581	133,93	(31,19)
Total Dana Bersih	184.636.390.565.427	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	102,71	10,61

Sumber: Accounting Division

a. Aset Investasi

Investasi ditempatkan pada portofolio yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Penempatan investasi tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada 31 Desember 2021 posisi nilai investasi sebesar Rp180.022.728.373.743,- mencapai 103,20% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp18.276.102.993.582,- atau naik sebesar 11,30%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya surplus dana Akumulasi Iuran Pensiun (akumulasi iuran dan hasil investasi setelah dikurangi dengan manfaat dan BOP).

Penempatan dana pada Deposito pada 31 Desember 2021 sebesar Rp33.307.100.000.000,-, mencapai 184,12% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.976.300.000.000,- atau naik 31,49%. Peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya penambahan penempatan dana di BTN, BNI dan BPD dengan mempertimbangkan *rate* yang ditawarkan pada BTN, BNI dan BPD pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan BRI selaku *central account*.

Tabel 14
Nilai Deposito
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	KETERANGAN	TINGKAT BUNGA	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANK RAKYAT INDONESIA	3,50%-7,30%	7.258.500.000.000	8.364.800.000.000
2	BANK TABUNGAN NEGARA	4,50%-6,50%	14.700.400.000.000	5.417.000.000.000
3	BANK NEGARA INDONESIA	4,25%-7,30%	779.500.000.000	352.500.000.000
4	BANK MANDIRI		-	410.500.000.000
5	BANK PEMBANGUNAN DAERAH :			
1	BPD JAWA TENGAH	4,50%-7,00%	2.308.500.000.000	4.181.000.000.000
2	BPD SULUTGO	5,75%-8,50%	425.000.000.000	516.500.000.000
3	BPD NTT	7,50%-8,00%	23.000.000.000	479.000.000.000
4	BPD DKI	5,75%	-	249.000.000.000
5	BPD SULSELBAR	7,00%	376.000.000.000	209.000.000.000
6	BPD RIAU KEPRI	7,00-7,50%	133.000.000.000	121.500.000.000
7	BPD KALIMANTAN TENGAH	8,00%	11.000.000.000	451.000.000.000
8	BPD NTB SYARIAH	7,5%-8%	660.000.000.000	644.000.000.000
9	BPD BENGKULU	7,25%-7,50%	136.200.000.000	249.500.000.000
10	BPD SUMUT	8,50%	412.000.000.000	218.000.000.000
11	BPD LAMPUNG	7,0%-8,25%	-	245.500.000.000
12	BPD JAMBI	8,00%	-	300.000.000.000
13	BPD KALIMANTAN SELATAN	8,00%	-	8.000.000.000
14	BPD SULAWESI TENGGARA	7,25%-8,25%	-	431.000.000.000
15	BPD SUMATERA BARAT	8,50%	200.000.000.000	200.000.000.000
16	BPD JAWA BARAT	4,25%-7,0%	4.807.500.000.000	2.215.500.000.000
17	BPD BALI	7,25%-8,00%	1.076.500.000.000	47.000.000.000
18	BPD SULAWESI TENGAH	7,50%	-	20.500.000.000
	JUMLAH		33.307.100.000.000	25.330.800.000.000

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada Surat Utang Negara pada 31 Desember 2021 sebesar Rp82.259.363.927.530,- mencapai 116,53% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp2.898.994.727.862,- atau naik 3,65%. Peningkatan disebabkan adanya penambahan pembelian SBN sampai periode 31 Desember 2021 antara lain:

- FR0088 nilai nominal sebesar Rp156.953.000.000,- dengan *rate* 6,25%,
- FR0089 nilai nominal sebesar Rp1.417.377.000.000,- dengan *rate* 6,88%
- FR0091 nilai nominal sebesar Rp930.700.000.000,- dengan *rate* 6,38%
- FR0092 nilai nominal sebesar Rp1.549.336.000.000.000,- dengan *rate* 7,13%

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada obligasi diperkenankan hanya atas Obligasi dengan rating minimal A-.

Tabel 15
Nilai Surat Utang Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	FR0042	2009	15/07/2027	10,25	20.000.000.000	24.459.619.200	60.000.000.000	74.448.000.000
2	FR0044	2009	15/09/2024	10,00	497.000.000	568.066.134	497.000.000	581.123.492
3	FR0045	2011	15/05/2037	9,75	-	-	40.700.000.000	51.125.712.000
4	FR0047	2008	15/02/2028	10,00	378.409.000.000	461.270.263.139	378.409.000.000	461.976.086.742
5	FR0050	2008	15/07/2038	10,50	3.769.651.000.000	4.998.557.226.000	3.594.651.000.000	4.773.696.528.000
6	FR0052	2009	15/08/2030	10,50	2.561.461.000.000	3.265.096.744.473	2.561.461.000.000	3.364.769.723.709
7	FR0054	2011	15/07/2031	9,50	2.406.652.000.000	2.918.462.527.247	1.784.440.000.000	2.219.361.561.200
8	FR0056	2010	15/09/2026	8,38	-	-	500.000.000.000	573.500.000.000
9	FR0057	2011	15/05/2041	9,50	3.313.580.000.000	4.140.846.494.059	3.284.911.000.000	4.062.613.679.250
10	FR0058	2012	12/06/2032	8,25	1.550.000.000.000	1.739.874.752.000	2.453.183.000.000	2.802.761.577.497
11	FR0059	2012	15/05/2027	7,00	-	-	2.625.841.000.000	2.815.942.277.823
12	FR0061	2012	15/05/2022	7,00	-	-	-	-
12	FR0062	2012	15/10/2042	6,38	2.137.525.000.000	2.100.118.312.500	2.137.525.000.000	2.006.558.073.740
13	FR0064	2013	15/05/2028	6,13	-	-	1.186.644.000.000	1.198.510.440.000
14	FR0065	2012	15/05/2033	6,63	4.389.769.000.000	4.429.386.665.225	4.389.769.000.000	4.476.049.909.695
15	FR0067	2013	15/02/2044	8,75	7.631.414.000.000	8.942.999.711.571	6.883.798.000.000	7.987.683.847.280
16	FR0068	2013	15/03/2034	8,38	4.164.774.000.000	4.711.399.629.602	5.051.774.000.000	5.916.637.708.800
17	FR0071	2013	15/03/2029	9,00	2.370.000.000.000	2.745.052.500.000	2.126.798.000.000	2.529.510.753.053
18	FR0072	2015	15/05/2036	8,25	6.157.606.000.000	6.842.668.423.520	6.157.606.000.000	7.185.207.794.107
19	FR0073	2015	15/05/2031	8,75	3.816.486.000.000	4.426.406.222.467	4.934.486.000.000	5.876.574.415.601
20	FR0074	2017	15-08-2032	7,50	484.151.000.000	515.868.671.263	834.151.000.000	907.025.559.426
21	FR0075	2017	15/05/2038	7,50	2.777.378.000.000	2.901.486.441.298	2.762.378.000.000	2.989.235.530.872
22	FR0076	2017	15/05/2048	7,38	6.949.004.000.000	7.183.789.720.188	5.849.004.000.000	6.179.281.463.570
23	FR0078	2019	15/05/2029	8,25	-	-	20.000.000.000	22.970.097.000
24	FR0079	2019	15/04/2039	8,38	2.235.714.000.000	2.525.699.296.513	1.825.714.000.000	2.160.184.804.800
25	FR0080	2019	15/06/2035	7,50	2.439.612.000.000	2.567.846.106.232	2.709.612.000.000	2.996.892.217.615
26	FR0082	2019	15/09/2030	7,00	1.011.511.000.000	1.051.215.780.592	1.031.511.000.000	1.112.277.723.339
27	FR0083	2019	15/04/2030	7,50	9.220.299.000.000	9.646.541.251.975	4.167.840.000.000	4.614.992.591.057
28	FR0088	2021	15/06/2036	6,25	156.953.000.000	157.345.382.500	-	-
29	FR0089	2021	15/08/2051	6,88	1.417.377.000.000	1.434.096.379.092	-	-
30	FR0091	2021	15/04/2032	6,38	930.700.000.000	938.452.731.000	-	-
31	FR0092	2021	15/06/2042	7,13	1.549.336.000.000	1.589.855.009.740	-	-
JUMLAH					73.839.859.000.000	82.259.363.927.530	69.352.703.000.000	79.360.369.199.668

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada Sukuk Pemerintah pada 31 Desember 2021 sebesar Rp30.704.929.291.285,- atau mencapai 126,14% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp7.144.902.386.570,- atau naik 30,33% antara lain disebabkan adanya penambahan pembelian PBS004 sebesar

Rp735.603.878.453,- PBS028 sebesar Rp3.673.941.518.240,- dan pembelian baru PBS025 sebesar Rp1.021.870.008.000,- serta peningkatan nilai pasar/wajar portofolio.

Tabel 16
Nilai Sukuk Pemerintah
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	IFR0006	2010	15/12/2030	10,25	50.000.000.000	63.055.301.500	50.000.000.000	64.511.043.000
2	IFR0007	2010	15/01/2025	10,25	629.307.000.000	730.550.042.314	629.307.000.000	743.926.296.132
3	IFR0010	2011	15/02/2036	10,00	1.152.306.000.000	1.445.154.694.638	1.152.306.000.000	1.514.277.556.122
4	PBS003	2012	15/01/2027	6,00	1.818.182.000.000	1.865.780.732.033	1.818.182.000.000	1.814.804.872.390
5	PBS004	2012	15/02/2037	6,10	3.623.872.000.000	3.530.556.607.464	2.931.240.000.000	2.794.952.729.011
6	PBS005	2013	15/04/2043	6,75	2.079.250.000.000	2.082.897.856.993	2.079.250.000.000	2.110.291.455.930
7	PBS007	2015	15/09/2040	9,00	2.179.994.000.000	2.588.078.957.827	2.179.994.000.000	2.663.292.435.017
8	PBS011	2016	15/08/2023	8,75	57.556.000.000	62.002.105.457	57.556.000.000	63.433.526.630
9	PBS012	2016	15/11/2031	8,88	9.015.632.000.000	10.640.344.812.725	8.828.632.000.000	10.521.948.167.494
10	PBS015	2018	15/07/2047	8,00	700.450.000.000	769.630.679.723	700.450.000.000	779.608.982.224
11	PBS019	2018	15/09/2023	8,25	-	-	135.670.000.000	147.999.743.868
12	PBS021	2019	15/11/2026	8,50	75.000.000.000	85.606.402.500	75.000.000.000	86.032.814.250
13	PBS022	2019	15/04/2034	8,63	56.654.000.000	64.726.648.855	56.654.000.000	66.808.893.542
14	PBS025	2021	15/05/2033	8,38	900.000.000.000	1.021.870.008.000	-	-
15	PBS028	2020	15/10/2046	7,75	3.474.205.000.000	3.862.079.907.345	174.829.000.000	188.138.389.105
16	PBS029	2021	15/03/2034	6,38	1.884.399.000.000	1.892.594.533.911	-	-
JUMLAH					27.696.807.000.000	30.704.929.291.285	20.869.070.000.000	23.560.026.904.715

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada sukuk korporasi sebesar Rp105.702.473.250,- mencapai 3,22% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp23.119.030.850,- atau naik 27,99%. Peningkatan ini disebabkan adanya pembelian sukuk Wijaya Karya sebesar Rp24.798.605.250,- dan adanya penurunan nilai wajar Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.679.574.400,-.

Tabel 17
Nilai Sukuk Korporasi
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	TAHUN BELI	TANGGAL JATUH TEMPO	RATE KUPON	31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)	
					NOMINAL	NILAI PASAR	NOMINAL	NILAI PASAR
1	KORPORASI SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	2019	21/03/2022	8,50	80.000.000.000	80.903.868.000	80.000.000.000	82.583.442.400
2	WIJAYA KARYA	2021	03/03/2028	9,75	25.000.000.000	24.798.605.250	-	-
JUMLAH					25.000.000.000	105.702.473.250	80.000.000.000	82.583.442.400

Sumber : Accounting Division

Penempatan dana pada reksadana per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.403.164.296.669,- mencapai 49,73% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp2.088.797.272.991,- atau naik 39,30%. Peningkatan signifikan disebabkan adanya penambahan pembelian Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sam Jalan Tol yang memiliki *underlying* 20% saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) sebesar Rp1.342.495.786.740,- Reksadana Saham HPAM Smart Beta Ekuitas sebesar Rp555.237.896.363,- Reksadana

Bahana ETF Bisnis 27 sebesar Rp98.309.660.000,- dan Reksadana Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund sebesar Rp146.648.511.570,-.

Beberapa pertimbangan pembelian diantaranya adalah jalan tol ruas Semarang-Batang yang beroperasi sejak 21 Desember 2018 sehingga tidak ada risiko konstruksi dan JSB mampu membukukan laba positif sehingga diproyeksikan dapat membagikan dividen mulai tahun 2026. Selain itu, investasi pada produk RDPT merupakan salah satu strategi *switching* portofolio.

Tabel 18
Nilai Reksadana
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Reksadana Saham				Rupiah
- Danareksa Mawar Konsumen 10	100.000.000.000	85.069.546.465	100.000.000.000	89.479.972.706
Dana Ekuitas Andalan	-	-	100.000.000.000	94.630.073.913
- Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G	100.000.000.000	90.740.298.119	-	-
- Samuel Indonesia Equity Fund	300.000.000.000	212.454.661.094	300.000.000.000	221.754.139.656
Schroder Dana Prestasi Plus	-	-	100.000.000.000	96.787.263.568
- Syailendra Equity BUMN Plus	200.000.000.000	188.673.320.502	200.000.000.000	187.464.282.875
- Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	200.000.000.000	165.679.237.955	200.000.000.000	169.138.905.458
- Syailendra Equity Opportunity Fund	100.000.000.000	94.256.650.059	100.000.000.000	93.582.157.153
- Sinarmas Saham Unggulan	200.000.000.000	145.934.195.229	200.000.000.000	139.108.781.623
- Tram Consumption Plus	200.000.000.000	185.624.850.572	200.000.000.000	181.073.899.359
- HPAM Smart Beta Ekuitas	1.050.000.000.000	1.069.466.400.270	500.000.000.000	514.228.503.907
Jumlah	2.450.000.000.000	2.237.899.160.265	2.000.000.000.000	1.787.247.980.218
Reksadana Pendapatan Tetap				
- Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1	450.000.000.000	454.042.667.956	450.000.000.000	457.683.580.091
- Kehati Lestari Kelas S	300.000.000.000	298.380.000.000	300.000.000.000	311.250.000.000
Jumlah	750.000.000.000	752.422.667.956	750.000.000.000	768.933.580.091
Reksadana ETF				
- Premier ETF IDX30	209.947.227.342	184.676.905.000	209.947.227.342	181.447.595.000
- Bahana ETF Bisnis 27	99.417.735.385	98.309.660.000	-	-
Jumlah	309.364.962.727	282.986.565.000	209.947.227.342	181.447.595.000
Reksadana Index				
- Insight Sri-Kehati Likuid	150.000.000.000	145.653.035.376	100.000.000.000	98.226.320.000
- Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund	150.000.000.000	146.648.511.570	-	-
Jumlah	300.000.000.000	292.301.546.946	100.000.000.000	98.226.320.000
Reksadana Campuran				
- Manulife Dana Campuran II	100.000.000.000	98.743.802.938	100.000.000.000	97.639.071.335
Jumlah	100.000.000.000	98.743.802.938	100.000.000.000	97.639.071.335
Reksadana Penyertaan Terbatas				
- RDPT Sam Jalan Tol	1.861.149.750.000	1.969.054.691.272	575.000.000.000	626.558.904.532
- RDPT Ekuitas Danareksa Toll Road -01	253.224.514.000	310.556.747.023	270.250.000.000	277.146.752.975
- RDPT Danareksa BUMN Fund 2019 - Properti 8	229.500.000.000	232.373.340.000	229.500.000.000	232.718.255.550
- RDPT Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	872.108.729.005	813.027.068.189	865.530.527.694	812.890.797.058
- RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas	510.480.091.750	413.798.707.080	574.134.841.750	431.557.766.919
Jumlah	3.726.463.084.755	3.738.810.553.564	2.514.415.369.444	2.380.872.477.034
Jumlah Total	7.635.828.047.482	7.403.164.296.669	5.674.362.596.786	5.314.367.023.678

Sumber : Accounting Division

Pada 31 Desember Tahun 2021 juga terjadi penurunan untuk penempatan dana pada beberapa instrumen investasi yaitu obligasi korporasi, MTN dan saham. Realisasi Obligasi Korporasi sebesar Rp17.926.389.870.080,- mencapai 59,29% dari RKA 2021 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.836.343.623.160,- atau turun 9,29%. Hal ini disebabkan oleh adanya obligasi yang telah jatuh tempo sampai dengan Desember 2021 yaitu :

1. PT Bank Tabungan Negara (Tahap II Tahun 2016 Seri B)
2. PT Bank Ekspor Indonesia (Tahap III Tahun 2016 Seri C dan Tahap II Tahun 2016 Seri C)
3. PT Pembangunan Perumahan (Tahap I Tahun 2018 Seri A)
4. PT Sarana Multigriya Financial (Tahap VI Tahun 2016 dan Tahap VI Seri B Tahun 2018)
5. PT Maybank Indonesia Finance (Tahap III Tahun 2016 Seri B)

Penempatan dana pada saham per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.224.226.884.750,- mencapai 65,59% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.326.224.550,- atau turun 0,17%.

Nilai wajar saham yang dimiliki Perseroan diukur berdasarkan harga kuotasi pasar aktif yaitu didasarkan pada harga penutupan bursa (Bursa Efek Indonesia) pada tanggal laporan yang diperoleh melalui fasilitas *Bloomberg*. IHSG pada 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 berada pada level 6.581,48 dan 5.979,07.

b. Aset Bukan Investasi

Realisasi Aset Bukan Investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.809.612.419.974,- mencapai 94,85% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp169.727.266.973,- atau turun 1,70%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemindahbukuan aset tanah sebesar Rp513.077.996.800,- dan bangunan sebesar Rp213.181.566.039 kepada Program THT.

Menindaklanjuti PMK 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang telah diperbaharui dengan PMK 52/PMK.02/2021 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Aset Bukan Investasi berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di 42 Kantor Cabang, telah dipindahbukukan ke Program Tabungan Hari Tua berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-206/MK.02/2021 tanggal 17 Maret 2021.

Pelaksanaan pemindahbukuan aset milik AIP berupa tanah dan bangunan menjadi aset program THT telah dilakukan pada bulan Juli 2021 dan penyelesaian pembayaran telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021.

Di sisi lain terjadi peningkatan pada Piutang hasil investasi, yang realisasinya pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.055.523.066.863,- mencapai 105,40% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp125.720.909.759,- atau naik 6,51%.

c. Kewajiban

Kewajiban yang timbul pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp192.822.962.471,- mencapai 133,93% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp87.399.069.110,- atau turun 31,19%. Penurunan yang paling signifikan diantaranya adalah Utang kepada program THT

yaitu turun sebesar Rp70.525.745.462,- karena adanya penyelesaian kewajiban berupa BOP.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2021 sebesar Rp109.432.436.580,- jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 mengalami peningkatan Rp20.342.688.515,- atau naik sebesar 22,83% yang merupakan utang kepada pihak ketiga terkait kepemilikan Jembatan Merah Plaza (JMP) atas estimasi biaya Hak Guna Bangunan (HGB) dan biaya *service charge*.

Kewajiban tersebut dicatat berdasarkan surat dari Perhimpunan Penghuni JMP Nomor 010/HPP/VI/12 tanggal 18 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Biaya Perpanjangan HGB per m² dari stan/kios sebesar Rp27.594.863.465,- (belum termasuk denda). Sedangkan untuk biaya service charge dari Juni 2005 sampai dengan Desember 2021 yang masih harus dibayar PT TASPEN (Persero) adalah Rp81.837.573.115,-.

Pada tanggal 26 Februari 2019, PT TASPEN (Persero) telah menerima surat somasi III (terakhir) nomor 05/K.Som.2/II/2019 dari Samba, Indra & Partners (Law Firm) selaku penerima kuasa dari PT Lamicitra Nusantara dan PT Jasamitra Propertindo terkait kewajiban biaya perpanjangan dan biaya service charge atas stand/kios milik PT TASPEN (Persero) di Jembatan Merah Plaza. PT TASPEN (Persero) dengan nomor SRT-26/L/032019 tanggal 8 Maret 2019 menjawab surat somasi tersebut dengan menyampaikan :

- Properti Investasi di Jembatan Merah Plaza merupakan milik AIP yang berasal dari APBN
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 tentang perubahan atas PMK 139/PMK.02/2017 pasal 32 ayat (1) “Badan Penyelenggara harus menyelesaikan penempatan aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan investasi bangunan atau tanah dengan bangunan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara sebelum tahun 2015” dan pasal 32 ayat (3) “Segala biaya yang timbul terkait dengan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar kewajiban yang melekat pada aset tersebut dapat mempergunakan hasil penyelesaian aset dimaksud”.

2. Penambahan Dana

Realisasi penambahan dana selama Periode 31 Desember 2021 sebesar Rp19.862.232.230.978,-, mencapai 83,67% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp8.882.550.736.851,- atau turun 30,90%. Secara ringkas realisasi penambahan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19
Penambahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
1	2	3	4	(5=3/2)	(6=3/4)
1. Hasil Investasi	12.670.715.460.862	12.798.057.842.003	12.772.560.061.687	101,01	0,20
2. Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi	827.365.411.706	(2.408.408.325.019)	6.457.382.253.982	291,09	(137,30)
3. Peningkatan/Penurunan Aset Tetap	-	694.285.123.343	583.231.866.721	-	19,04
4. Iuran Peserta	8.812.478.909.986	8.775.090.862.137	8.925.628.769.875	99,58	(1,69)
5. Pendapatan Diluar Investasi	1.429.302.796.789	3.206.728.514	5.980.015.564	0,22	(46,38)
Jumlah	23.739.862.579.342	19.862.232.230.978	28.744.782.967.829	83,67	(30,90)

Sumber: Accounting Division

a. Hasil Investasi

Hasil investasi selama periode 31 Desember 2021 sebesar Rp12.798.057.842.003,-, mencapai 101,01% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp25.497.780.316,- atau naik 0,20%.

Kenaikan signifikan berasal dari kontribusi Bunga Obligasi Surat Utang Negara yang realisasinya pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.079.897.828.907,- mencapai 113%, yang jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp595.042.103.013,- atau naik 10,85%. Hal ini disebabkan adanya penambahan pembelian FR0088 dengan rate kupon 6,25%, FR0089 dengan rate kupon 6,88%, FR0091 dengan rate kupon 6,38% dan FR0092 dengan rate kupon 7,13%. Demikian juga dengan imbal hasil Sukuk Pemerintah yang realisasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.875.380.161.423,- mencapai 104,59% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp223.479.864.586,- disebabkan adanya pembelian PBS025, PBS028 dan PBS029.

Realisasi Pendapatan Investasi Lainnya pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.333.281.110,- jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.290.081.110,- atau naik 2.986,30% yang disebabkan oleh pendapatan bunga deposito yang jatuh temponya terjadi pada hari libur.

Realisasi Dividen Reksadana periode 31 Desember 2021 sebesar Rp55.350.768.700,- yang jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.750.373.818,- atau naik 3,27%. Hal ini disebabkan adanya penerimaan dividen reksadana pada periode 31 Desember 2021 antara lain Bahana TCW Asset Management, Manulife Asset Management, Indo Premier Investment Management, Samuel Asset Management, Ashmore Asset Management dan Syailendra Capital.

Realisasi Bunga Deposito periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.923.401.178.367,- mencapai 144,20% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp234.063.752.924,- atau turun 10,85%. Penurunan ini antara lain disebabkan rate bunga yang berlaku saat ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penempatan dana pada Deposito merupakan penempatan sementara sambil menunggu *timing* untuk *switching* ke instrumen

lainnya dengan mempertimbangkan kondisi pasar saham yang perlahan kondusif akibat terimbas Pandemi Covid-19.

Realisasi Bunga Obligasi Korporasi periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.500.060.305.559,-, mencapai 72,46% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp144.832.999.950,- atau turun 8,81%. Hal ini disebabkan beberapa obligasi korporasi telah jatuh tempo selama periode tahun 2021.

b. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat Investasi pada periode laporan. Per 31 Desember 2021, nilai wajar investasi mengalami penurunan sebesar Rp2.408.408.325.019,- mencapai 291,09% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp8.865.790.579.001,- atau turun 137,30%.

Penurunan ini disebabkan kondisi pasar modal yang masih terimbas pandemi Covid-19, sehingga nilai wajar untuk instrumen investasi Obligasi, Sukuk, MTN, Reksadana dan Saham mengalami penurunan.

c. Peningkatan (Penurunan) Aset Tetap

Peningkatan Aset Tetap pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp694.285.123.343,- meningkat sebesar Rp111.053.256.622,- atau naik 19,04% dari periode 31 Desember 2020, merupakan selisih penilaian atas aset tanah dan bangunan berdasarkan *appraisal* oleh KJPP Karmanto & Rekan pada tahun 2020 yang dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam pemindahbukuan aset milik AIP menjadi aset program THT.

d. Iuran Peserta

Realisasi pendapatan iuran peserta pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.775.090.862.137,- mencapai 99,58% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp150.537.907.738,-. Terjadinya penurunan jumlah peserta karena kejadian Pensiun, Meninggal dan Keluar yang berdampak pada penurunan pendapatan iuran, sedangkan penambahan peserta baru yang ditargetkan sebanyak 150.315 orang selama tahun 2021, baru terealisasi sebanyak 9.968 orang atau 6,63% dari target RKAP.

e. Pendapatan Diluar Investasi

Pendapatan Diluar Investasi yang termasuk diantaranya pendapatan sewa gedung dan ruang, pendapatan jasa giro dan laba penjualan aset, pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.206.728.514,- mencapai 0,22% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.773.287.050,- atau turun 46,38%. Penurunan ini sebagai dampak atas pemindahbukuan Aset Tanah dan Bangunan milik AIP ke Program THT pada tahun 2021 sehingga tidak terdapat pendapatan atas sewa gedung dan ruang sejak 1 Juli 2021.

3. Pengurangan Dana

Total Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara selama periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.675.129.975.259,- mencapai 97,17% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.052.379.277.695,- atau turun 80,81%.

Sebagai gambaran secara ringkas pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 20
Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1 Beban Investasi	8.239.562.219	29.255.670.375	50.178.453.664	355,06	(41,70)
2 Beban Operasional					
a. Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	682.357.077.280	656.428.980.404	95,90	3,95
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	855.509.745.499	852.399.567.738	100,84	0,36
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	2.340.313.337	14.514.889.753	155,40	(83,88)
3 Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	105.667.168.768	134.027.175.066	68,52	(21,16)
4 Beban AIP untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	6.928.027.094.000	-	(100,00)
5 Beban Lain-Lain	-	-	91.933.092.329	-	(100,00)
Jumlah Pengurangan	1.723.865.917.411	1.675.129.975.259	8.727.509.252.954	97,17	(80,81)

Sumber: Accounting Division

a. Beban Investasi

Realisasi beban investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp29.255.670.375,- atau mencapai 355,06% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.922.783.289,- atau turun 41,70%. Penurunan ini disebabkan pengakuan *service charge* JMP Surabaya tahun 2020 merupakan akumulasi dari pengakuan *service charge* dari tahun 2018 - 2020 sedangkan tahun 2021 hanya pengakuan *service charge* tahun 2021.

b. Beban Operasional

1) Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun merupakan biaya yang dibebankan kepada Akumulasi Iuran Pensiun PNS atas penugasan Pemerintah kepada PT TASPEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun sesuai PMK 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero).

BOP atas Pengelolaan Dana AIP PNS dibayarkan dalam rangka pengelolaan Dana AIP berdasarkan PMK 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.02/2018 pada tanggal 21 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai

Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Beban operasional penyelenggaraan terdiri dari;

a) BOP Pembayaran Manfaat Pensiun

BOP Pembayaran Manfaat Pensiun PNS pada 31 Desember 2021 sebesar Rp682.357.077.280,- mencapai 95,90% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.928.096.876,- atau naik 3,95%. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) 2021 ditetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp691.275.368.730,- dengan biaya satuan tahun 2021 sebesar Rp19.984,- per penerima manfaat pensiun dan keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021.

b) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS

BOP Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS merupakan beban yang terjadi selama tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan rumus 6,7% dari hasil investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dikurangi dengan Beban Investasi. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Realisasi BOP pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS pada 31 Desember 2021 sebesar Rp855.509.745.499,- mencapai 100,84% dari RKA 2021 yang jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.110.177.761,- atau naik 0,36%. Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya hasil investasi tahun 2021.

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.340.313.337,- mencapai 155,40% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.174.576.416,- atau turun 83,88%. Penurunan tersebut antara lain disebabkan Pemindahbukuan aset berupa bangunan ke Program THT.

c. Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)

Realisasi pembayaran Manfaat Nilai Tunai (SP3IP) pada 31 Desember 2021 sebesar Rp105.667.168.768,- mencapai 68,52% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.360.006.298,- atau turun 21,16%. Penurunan ini berbanding lurus dengan kejadian klaim yang turun sebanyak 965 kejadian menjadi 2.669 kejadian di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh pengajuan klaim untuk kejadian keluar sebelum mencapai usia pensiun yang berasal dari peserta dengan masa kerja yang lebih lama, sehingga manfaat nilai tunai yang dibayarkan lebih besar.

4. Dana Bersih Akhir Periode

Dana Bersih pada 31 Desember 2021 sebesar Rp189.639.517.831.246,- atau mencapai

*Bab II - Laporan Kegiatan -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)*

102,71% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp18.193.774.795.719,- atau naik 10,61%.

Sebagai gambaran Perubahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 21
Perubahan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada Tahun 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1. PENAMBAHAN					
Hasil Investasi					
Bunga Deposito	1.333.865.862.314	1.923.401.178.367	2.157.464.931.291	144,20	(10,85)
Bunga Obligasi					
- Surat Utang Negara	5.380.251.727.200	6.079.897.828.907	5.484.855.725.894	113,00	10,85
- Obligasi Korporasi	2.070.214.178.316	1.500.060.305.559	1.644.893.305.509	72,46	(8,81)
Imbal Hasil Sukuk					
- Sukuk Pemerintah	1.792.997.385.000	1.875.380.161.423	1.651.900.296.837	104,59	13,53
- Sukuk Korporasi	156.758.333.333	8.810.939.291	9.075.000.015	5,62	(2,91)
Bunga Medium Term Notes	38.048.250.000	2.579.500.000	4.294.583.333	6,78	(39,94)
Dividen Penyertaan	-	2.205.450.000	2.301.065.000	-	(4,16)
Dividen Saham	185.807.028.699	149.810.228.011	194.043.496.174	80,63	(22,80)
Dividen Reksadana	-	55.350.768.700	53.600.394.882	-	3,27
Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	136.040.019.252	132.909.526.183	57,38	2,36
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	1.063.188.181.383	1.437.178.536.569	72,05	(26,02)
Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.281.110	43.200.000	-	2.986,30
Sub Jumlah Hasil Investasi	12.670.715.460.862	12.798.057.842.003	12.772.560.061.687	101,01	0,20
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi					
Obligasi	200.808.780.896	(2.149.738.327.706)	5.913.611.241.490	1.070,54	(136,35)
Sukuk	14.632.991.000	21.943.815.242	2.125.885.599.273	(149,96)	(98,97)
Medium Term Notes	643.053.739	(251.976.000)	251.976.000	(39,18)	(200,00)
Reksadana	66.810.585.850	19.672.504.354	(42.238.976.490)	(29,45)	146,57
Saham	544.470.000.222	(320.945.739.928)	(672.906.766.751)	58,95	52,30
Properti Investasi	-	314.000.000	9.442.000.000	-	(96,67)
Penempatan Langsung	-	20.597.399.019	(876.662.819.540)	-	(102,35)
Sub Jumlah Peningkatan (Penurunan)	827.365.411.706	(2.408.408.325.019)	6.457.382.253.982	291,09	(137,30)
Peningkatan/Penurunan Aset Tetap					
Iuran Peserta	-	694.285.123.343	583.231.866.721	-	19,04
Pendapatan Diluar Investasi	8.812.478.909.986	8.775.090.862.137	8.925.628.769.875	99,58	(1,69)
Jumlah Penambahan	23.739.862.579.342	19.862.232.230.978	28.744.782.967.829	83,67	(30,90)
2. PENGURANGAN					
Beban Investasi	8.239.562.219	29.255.670.375	50.178.453.664	355,06	(41,70)
Beban Operasional					
Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	682.357.077.280	656.428.980.404	95,90	3,95
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	855.509.745.499	852.399.567.738	100,84	0,36
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	2.340.313.337	14.514.889.753	155,40	(83,88)
Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	105.667.168.768	134.027.175.066	68,52	(21,16)
Setoran AIP untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	6.928.027.094.000	-	(100,00)
Beban Lain-Lain	-	-	91.933.092.329	-	(100,00)
Jumlah Pengurangan	1.723.865.917.411	1.675.129.975.259	8.727.509.252.954	97,17	(80,81)
3. PENINGKATAN/PENURUNGAN DANA					
Dana Bersih Awal Periode	22.015.996.661.931	18.187.102.255.719	20.017.273.714.875	82,61	(9,14)
Koreksi Dana Bersih	162.620.393.903.496	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	105,43	13,22
Dana Bersih Akhir Periode	184.636.390.565.427	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	102,71	10,61

Sumber: Accounting Division

C. ASPEK INVESTASI

1. Penempatan Investasi

Investasi Dana Akumulasi Iuran Pensiun ditempatkan pada portofolio yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Pengelolaan dana AIP dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berlaku yaitu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian (*prudent*), keamanan dana, dan hasil yang memadai. Dana yang ditempatkan pada berbagai jenis portofolio investasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penempatan Investasi dapat diuraikan pada tabel berikut:

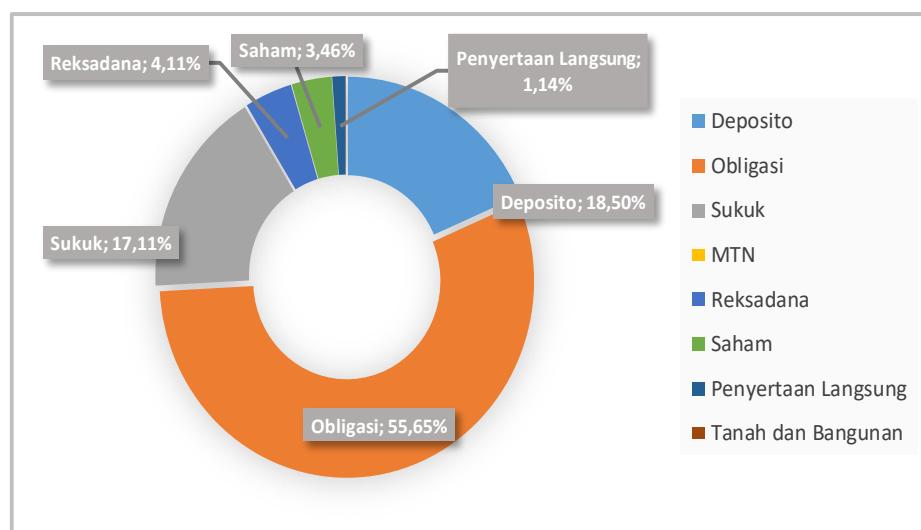
Tabel 22
Penempatan Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKAP 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
1	2	3	4	(5=3/2)	(6=3/4)
Deposito	18.089.980.526,840	33.307.100.000,000	25.330.800.000,000	184,12	31,49
Obligasi	100.827.824.899,624	100.185.753.797,610	99.123.102.692,908	99,36	1,07
Sukuk	27.624.973.333,509	30.810.631.764,535	23.642.610.347,115	111,53	30,32
MTN	631.771.929,630	-	30.251.976,000	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191,087	7.403.164.296,669	5.314.367.023,678	49,73	39,30
Saham	9.490.244.031,973	6.224.226.884,750	6.234.553.109,300	65,59	(0,17)
Penyertaan Langsung	2.887.659.000,000	2.043.444.630,179	2.022.847.231,160	70,76	1,02
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000,000	48.093.000,000	-	0,65
Jumlah	174.438.480.912,663	180.022.728.373.743	161.746.625.380.161	103,20	11,30

Sumber: Accounting Division

Jumlah Investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp180.022.728.373.743,- mencapai 103,20% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp18.276.102.993.582,- atau naik 11,30%.

Grafik : 1
Proporsi Penempatan Investasi
Per 31 Desember Tahun 2021



2. Hasil Investasi

Secara ringkas hasil investasi pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana tabel berikut:

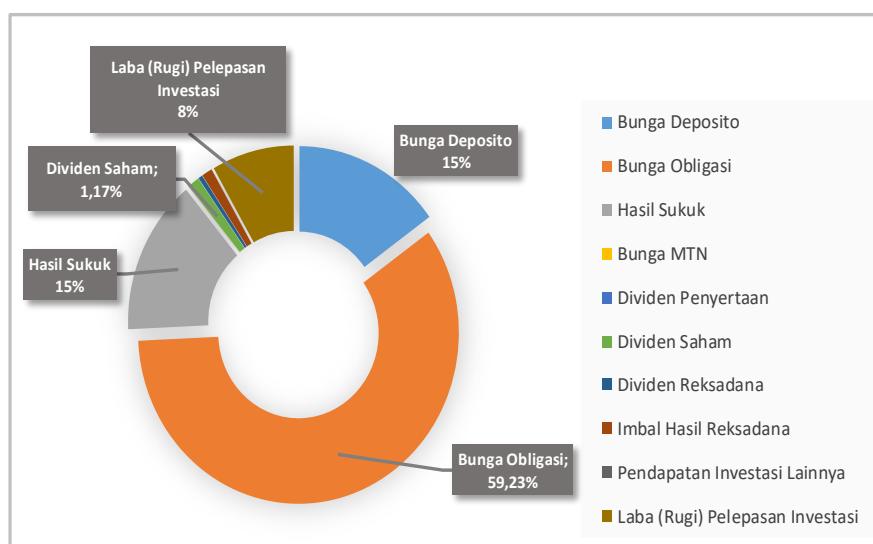
Tabel 23
Hasil Investasi Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	Rupiah % Naik/ Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
1	2	(3)	(4)	(5=3/2)	(6)
Bunga Deposito	1.333.865.862.314	1.923.401.178.367	2.157.464.931.291	144,20	(10,85)
Bunga Obligasi	7.450.465.905.516	7.579.958.134.466	7.129.749.031.403	101,74	6,31
Hasil Sukuk	1.949.755.718.333	1.884.191.100.714	1.660.975.296.852	96,64	13,44
Bunga MTN	38.048.250.000	2.579.500.000	4.294.583.333	6,78	(39,94)
Dividen Penyertaan	-	2.205.450.000	2.301.065.000	0,00	(4,16)
Dividen Saham	185.807.028.699	149.810.228.011	194.043.496.174	80,63	(22,80)
Dividen Reksadana	-	55.350.768.700	53.600.394.882	0,00	3,27
Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	136.040.019.252	132.909.526.183	57,38	2,36
Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.281.110	43.200.000	0,00	2.986,30
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	1.063.188.181.383	1.437.178.536.569	72,05	(26,02)
Jumlah	12.670.715.460.862	12.798.057.842.003	12.772.560.061.687	101,01	0,20

Sumber: Accounting Division

Hasil investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp12.798.057.842.003,- mencapai 101,01% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.497.780.316,- atau naik 0,20%.

Grafik : 2
Proporsi Hasil Investasi
Per 31 Desember Tahun 2021



3. Beban Investasi

Tabel 24
Beban Investasi
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	RKAP 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun	Rupiah
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)	
Beban Investasi	8.239.562.219	29.255.670.375	50.178.453.664	355,06	(41,70)	

Sumber: Accounting Division

Realisasi beban investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp29.255.670.375,- atau mencapai 355,06% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.922.783.289,- atau turun 41,70%. Penurunan ini disebabkan pengakuan *service charge* JMP Surabaya tahun 2020 merupakan akumulasi dari pengakuan *service charge* dari tahun 2018 - 2020 sedangkan tahun 2021 hanya pengakuan *service charge* tahun 2021.

Rincian Beban Investasi sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
Beban Penyimpanan Surat Berharga	7.630.759.516	7.029.694.777
Beban Administrasi Bank	10.487.007	6.851.951
Beban Terkait JMP Surabaya		
- Beban Asuransi	152.750.549	130.988.000
- Beban PBB	194.438.260	194.438.260
- Beban Service Charge	20.342.688.515	41.960.191.435
Sub Jumlah	20.689.877.324	42.285.617.695
Beban Terkait Investasi Langsung		
- Beban Jasa Penilaian Investasi	924.546.528	856.289.241
Sub Jumlah	924.546.528	856.289.241
Jumlah	29.255.670.375	50.178.453.664

4. Realisasi Tingkat Pengembalian Hasil Investasi (Yield on investment/YOI)

Perubahan metode perhitungan YOI, dari aritmatik menjadi geometrik, dengan mengadopsi *best practice* industri dana pensiun, sehingga perhitungan YOI berdasarkan Geometris sebagaimana PMK Nomor : 169/PMK.02/2019 disajikan sebagai berikut:

	JANUARI 2021	FEBRUARI 2021	MARET 2021	APRIL 2021	MEI 2021	JUNI 2021
NILAI INVESTASI	169.238.702.388.916	168.485.766.570.559	168.169.756.291.078	171.301.816.497.063	173.578.248.880.250	173.976.751.009.261
HASIL INVESTASI	1.032.856.829.911	2.016.986.975.873	2.993.195.524.486	3.964.871.131.089	4.954.652.370.885	6.030.630.254.179
YOI GEOMETRIS	0,61%	1,19%	1,77%	2,34%	2,91%	3,53%

	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021
NILAI INVESTASI	176.768.913.727.470	179.911.322.984.895	180.881.919.770.457	183.482.020.899.894	186.421.927.767.246	180.022.728.373.743
HASIL INVESTASI	7.021.448.772.737	8.010.027.705.501	8.989.955.273.676	10.360.934.644.981	11.571.368.875.767	12.798.057.842.003
YOD GEOMETRIS	4,09%	4,64%	5,18%	5,94%	6,59%	7,27%

Realisasi YOI geometris sampai dengan Desember 2021 sebesar 7,27%, kontribusi terbesar berasal dari optimalisasi hasil pada instrumen SBN dan deposito selama tahun 2021 yang mampu memberikan hasil di atas targetnya masing-masing serta kinerja pasar modal yang perlahan bangkit akibat dampak pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi kondisi tersebut telah dilakukan *rebalancing* portofolio sehingga dampak penurunan kinerja pasar modal tidak berdampak besar pada kinerja Dana AIP secara keseluruhan. Rebalancing dilakukan melalui rencana penambahan penempatan dana pada instrumen yang memberikan *return variable* disesuaikan dan dialihkan ke instrumen yang memberikan hasil tetap dengan risiko yang cukup rendah. Hal tersebut tercermin dari posisi nilai saham dan reksa dana masih di bawah targetnya, sedangkan posisi nilai deposito dan SUN berada di atas targetnya.

5. Karakteristik dan Risiko tiap jenis Investasi

Instrumen investasi yang diperkenankan dalam portofolio investasi Akumulasi Iuran Pensiun adalah sebagai berikut:

a. Deposito

Risiko atas penempatan aset investasi di Deposito berupa risiko kerugian, baik penurunan maupun kehilangan nilai investasi yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam melakukan pembayaran nilai pokok beserta bunga kepada deposan. Aspek dan indikator risiko penempatan Deposito sebagai berikut:

Aspek Risiko	Indikator
Risiko Likuiditas	Aset Likuid Primer & Likuid Sekunder/Pendanaan Jangka Pendek
	LFR (Loan to Funding Ratio)
Risiko Pasar	Total Derivatif/Total Aset
	Aset Keuangan Jatuh Tempo > 1 Tahun/Kewajiban Keuangan Jatuh Tempo > 1 Tahun
Risiko Kredit	Non Performance Loan (NPL)
	Aktiva Produktif Bermasala/Total Aktif Produktif
Faktor Profitabilitas	Net Interest Margin (NIM)
	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Faktor Permodalan	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Faktor Kualitatif	Risiko Manajemen & Reputasi

b. Surat Utang Negara (SUN)

Risiko atas penempatan aset investasi pada SUN berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai atau hilangnya manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi makroekonomi domestik. Aspek dan indikator risiko penempatan SUN sebagai berikut :

Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi
Risiko Likuiditas	Rata-rata Transaksi (Miliar) Persentase Likuiditas
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
Risiko Inflasi	Rasio Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

c. Obligasi Korporasi dan Sukuk

Risiko atas penempatan aset investasi pada Obligasi Korporasi dan Sukuk berupa risiko kerugian, seperti penurunan atau hilangnya nilai serta manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi fundamental penerbit obligasi. Aspek dan indikator risiko penempatan Obligasi Korporasi dan Sukuk sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
1. Obligasi Sektor Finance AFS	
Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi
	Outlook Industri
	Rating Z-Score
Risiko Kredit	Penerbit Senioritas Obligasi DER
Risiko Likuiditas	Persentase Likuiditas Rata-rata Transaksi (Miliar)
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
2 Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
	Rating Z-score
Risiko Kredit	Penerbit Senioritas Obligasi DER
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
Risiko Inflasi	Rasion Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

3 Obligasi Sektor Non Finance AFS	
Risiko Suku Bunga	Durasi dan Konveksitas
Risiko Pasar	Outlook Ekonomi Outlook Industri
	Rating Z-Score
Risiko Kredit	Penerbit Senioritas Obligasi DER ICR
Risiko Likuiditas	Persentase Likuiditas Rata-rata Transaksi (Miliar)
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
4 Obligasi Sektor Non Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
	Rating Z-score
Risiko Kredit	Penerbit Senioritas Obligasi DER ICR
Risiko Spesifik	Reputasi Manajemen
Risiko Inflasi	Risiko Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

d. Medium Terms Note (MTN)

Risiko atas penempatan aset investasi pada MTN berupa risiko kerugian, seperti penurunan atau hilangnya nilai serta manfaat investasi yang timbul akibat faktor perubahan pasar maupun kondisi fundamental penerbit MTN. Aspek dan indikator risiko penempatan MTN sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
1. MTN Non Finance	
Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
	Rating Z-score
Risiko Kredit	Penerbit Senioritas Obligasi DER ICR
Risiko Spesifik	Reputasi
Risiko Inflasi	Rasion Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

2. MTN Finance	
Obligasi Sektor Finance HTM	
Risiko Reinvestasi	YTM/Deposito TTM (Year)
Risiko Kredit	Rating Z-score Penerbit Senioritas Obligasi DER
Risiko Spesifik	Reputasi
Risiko Inflasi	Rasio Kupon/Ekspektasi Inflasi Tahunan

e. Reksa Dana

Risiko atas penempatan aset investasi pada Reksa Dana berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai investasi, yang timbul akibat faktor perubahan isu di pasar modal maupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja investasi Reksa Dana. Aspek dan indikator risiko penempatan Reksa Dana sebagai berikut :

- Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham

Aspek Risiko	Indikator
Risiko Pasar	Prospek Benchmark Volatilitas Value at Risk Volatilitas Downside Risk
Risiko Regulasi	Kepatuhan
Risiko Likuiditas	Kelas AUM
Risiko Spesifik	Reputasi MI

- Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbasis Equity dan Berbasis Utang

Aspek Risiko	Indikator
1. RD Penyertaan Terbatas berbasis Equity	
Faktor Kuantitatif	Profitabilitas (IRR) Solvabilitas (DER)
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha Regulasi Reputasi Manager
2. RD Penyertaan Terbatas berbasis Utang	
Faktor Kuantitatif	Z-Score Penerbit DER ICR
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha Regulasi Reputasi Manajer Investasi

f. Saham

Risiko atas penempatan aset investasi di Saham Indonesia berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai investasi yang timbul akibat faktor perubahan isu di pasar saham maupun fundamental emiten. Aspek dan indikator risiko penempatan Saham sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator	
Pasar	Volatilitas Harga	Unrealized Gain (Loss)
		VaR
Fundamental	Profitabilitas	CAGR Laba Bersih 3 Tahun Operating Margin
	Valuation	Potential Gain (Loss)
		Prospek Industri Aksi Korporasi per Emiten
Likuiditas	Kelompok Indeks	

g. Penyertaan Langsung

Risiko atas penempatan aset investasi pada Penyertaan Langsung berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai maupun manfaat investasi yang timbul akibat perubahan kondisi fundamental serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian investasi di Penyertaan Langsung. Aspek dan indikator risiko penempatan Penyertaan Langsung sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
Aspek Risiko	Indikator
Aspek Kuantitatif	Profitabilitas (IRR)
	Solvabilitas (DER)
Aspek Kualitatif	Prospek Usaha
	Regulasi
	Legalitas Reputasi Manajemen

h. Tanah dan Bangunan

Risiko atas penempatan aset investasi pada Tanah dan atau Bangunan berupa risiko kerugian, seperti penurunan nilai maupun manfaat investasi yang timbul akibat perubahan kondisi serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian investasi di Tanah dan atau Bangunan. Aspek dan indikator risiko penempatan Tanah dan Bangunan sebagai berikut :

Aspek Risiko	Indikator
Faktor Kuantitatif	Imbal Hasil (Return)
	Valuasi
Faktor Kualitatif	Prospek Usaha
	Regulasi
	Legalitas
	Kepemilikan

BAB III
LAPORAN ADMINISTRASI DANA BELANJA PENSIUN APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASSEN (Persero) dan PT Asabri (Persero), dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PT TASSEN (Persero) diimbau untuk membuka rekening yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN dan melakukan penyetoran Jasa Giro atas rekening tersebut ke Kas Negara.

Sebagai turunan dari Peraturan tersebut, telah terbit Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015, tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja yang Dilaksanakan oleh PT TASSEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang terakhir diubah pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, PT TASSEN (Persero) telah melakukan pemisahan rekening antara Belanja Pensiun (APBN) dan rekening Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP). Sehingga terhitung mulai Bulan Agustus 2015 laporan keuangan telah disajikan dengan format yang telah disesuaikan yaitu pemisahan Laporan dan transaksi Keuangan Program Pensiun yang berasal dari DAIP dan Dana APBN. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor: PD-43/DIR/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pencairan, Penyaluran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun.

A. Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 2.847.034 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp111.506.946.319.223,- mencapai masing-masingnya sebesar 96% dan 99,54% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebanyak 28.915 orang atau naik 1,03% begitu juga dengan jumlah pembayaran mengalami peningkatan sebesar Rp5.887.002.454.528,- atau naik 5,57%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pembayaran manfaat pensiun PNS DO sebesar Rp5.333.522.723.573,- Pensiun 13 sebesar Rp627.789.196.999,- dan THR sebesar Rp721.271.075.082,-.

Gambaran jumlah penerima manfaat pensiun menurut kelompok pensiun dapat diuktisarkan dalam tabel berikut:

Tabel 25
Jumlah Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Kelompok Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
PNS DAN PEJABAT NEGARA										
A TAHUN BERJALAN										
PNS PUSAT	873.097	30.238.461.598.550	828.255	25.172.511.044.856	861.041	25.183.436.501.897	94,86	83,25	(3,81)	(0,04)
PNS DO	1.829.994	74.471.698.499.575	1.769.360	64.774.320.415.499	1.678.396	59.440.797.691.926	96,69	86,98	5,42	8,97
HAKIM	3.767	182.130.738.454	3.640	149.077.683.740	3.520	139.628.071.857	96,63	81,85	3,41	6,77
PEJABAT NEGARA	6.387	175.791.528.162	5.907	135.203.108.715	6.007	139.144.665.031	92,48	76,91	(1,66)	(2,83)
TNI/ POLRI	111.932	2.770.169.404.172	104.710	2.104.729.719.540	120.117	2.340.381.916.916	93,55	75,98	(12,83)	(10,07)
VETERAN	110.122	3.148.642.051.685	107.477	1.946.983.234.492	119.724	2.135.570.319.240	97,60	61,84	(10,23)	(8,83)
PKRI/ KNIP	439	12.911.889.705	423	11.347.485.362	494	11.552.129.900	96,36	87,88	(14,37)	(1,77)
DANA KEHORMATAN	3.211	31.751.639.160	1.585	552.795.834.000	2.118	627.746.465.750	49,36	1.741,00	(25,17)	(11,94)
PEGADIAN	600	17.273.125.289	539	11.313.269.768	621	12.497.297.724	89,83	65,50	(13,20)	(10,90)
PENSIUN 13	-	-	-	7.715.995.485.523	-	7.088.206.288.524	-	-	-	8,86
THR	-	-	-	7.661.024.271.724	-	6.939.753.196.642	-	-	-	10,39
TAHUN BERJALAN	2.939.549	111.048.830.473.752	2.821.896	110.235.301.553.219	2.792.038	104.058.914.545.407	96,00	99,27	1,07	5,94

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)					
	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4/2)	(9=5/3)	(10=4/6)	(11=7/5)
B SEBELUM TAHUN BERJALAN	-	-	-	390.376.903.103	-	664.466.005.141	-	-	-	(41,25)
PNS DAN PEJABAT NEGARA	2.939.549	111.048.830.473.752	2.821.896	110.625.678.456.322	2.792.038	104.723.380.550.548	96,00	99,62	1,07	5,64
PNS EKS PNS DEPHUB PADA PT KAI	26.175	974.307.036.333	25.138	881.267.862.901	26.081	896.563.314.147	96,04	90,45	(3,62)	(1,71)
Jumlah	2.965.724	112.023.137.510.085	2.847.034	111.506.946.319.223	2.818.119	105.619.943.864.695	96,00	99,54	1,03	5,57

Sumber: Accounting Division & Membership Division

a. PNS Pusat

Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Pusat 31 Desember 2021 sebanyak 828.255 orang dengan nilai pembayaran sebesar Rp25.172.511.044.856,- mencapai 94,86% dan 83,25% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Pusat bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 32.786 orang atau turun 3,81%.

b. PNS Daerah Otonom

Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Daerah Otonom 31 Desember 2021 sebanyak 1.769.360 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp64.774.320.415.499,- mencapai 96,69% dan 86,98% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun PNS Daerah Otonom bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebanyak 90.964 orang atau naik 5,42%.

c. Hakim

Jumlah penerima manfaat pensiun Hakim Tahun 31 Desember 2021 sebanyak 3.640 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp149.077.683.740,- mencapai 96,63% dan 81,85% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Hakim bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebanyak 120 orang atau naik 3,41%.

d. Pejabat Negara

Jumlah penerima manfaat pensiun Pejabat Negara Tahun 31 Desember 2021 sebanyak 5.907 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp135.203.108.715,- mencapai 92,48% dan 76,91% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Pejabat Negara bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 100 orang atau turun 1,66%.

e. TNI/POLRI

Jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI 31 Desember 2021 sebanyak 104.710 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp2.104.729.719.540,- mencapai 93,55% dan 75,98% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 15.407 orang atau turun 12,83%.

Menurunnya jumlah penerima manfaat pensiun TNI/POLRI ini dikarenakan penerima pensiun meninggal dunia tanpa ahli waris (punah) serta Yatim Piatu yang telah dewasa, dan sejak 1 April 1989 PT TASPERN (Persero) tidak lagi membayarkan manfaat

pensiun peserta TNI/POLRI yang mengalami Pensiun karena telah dialihkan pembayarannya melalui PT ASABRI (Persero).

f. Veteran

Jumlah penerima Tunjangan Veteran 31 Desember 2021 sebanyak 107.477 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp1.946.983.234.492,- mencapai 97,60% dan 61,84% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan Veteran bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 12.247 orang atau turun 10,23%

g. PKRI/KNIP

Jumlah penerima Tunjangan PKRI/KNIP 31 Desember 2021 sebanyak 423 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp11.347.485.362,- mencapai 96,36% dan 87,88% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan PKRI/KNIP bila dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 71 orang atau turun 14,37%. Penurunan jumlah penerima ini akan terus terjadi, karena tidak adanya pengajuan penerima Tunjangan PKRI/KNIP yang baru serta penerima tunjangan yang ada sudah tidak memiliki ahli waris (punah) mengingat anggota PKRI/KNIP merupakan pelaku sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

h. Dana Kehormatan

Jumlah penerima Tunjangan Dana Kehormatan 31 Desember 2021 sebanyak 1.585 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp552.795.834.000,- mencapai 49,36% dan 1.741% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima Tunjangan Dana Kehormatan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 533 orang atau turun 25,17%. Penurunan ini dikarenakan terdapat penerima dana kehormatan yang meninggal dan tunjangan dana kehormatan hanya melekat pada penerima tunjangan dana kehormatan, tidak diturunkan kepada ahli warisnya (istri/suami/anak).

i. Pegadaian

Jumlah penerima manfaat pensiun Pegadaian 31 Desember 2021 sebanyak 539 orang, dengan nilai pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp11.313.269.768,- mencapai 89,83% dan 65,50% dari RKA Tahun 2021. Jumlah penerima manfaat pensiun Pegadaian bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebanyak 82 orang atau turun 13,20%. Penurunan ini akan terus terjadi karena tidak adanya peserta baru dan penerima manfaat pensiun yang ada sudah tidak memiliki ahli waris (punah), mengingat bahwa penerima manfaat pensiun ini merupakan penerima manfaat pensiun PNS eks Departemen Keuangan yang dialihkan pembayarannya dari Dana Pensiun Pegadaian kepada PT TASPERN (Persero) terhitung mulai tanggal 1 September 2004, berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: S-2348/A/2004 tanggal 31 Mei 2004.

j. Pensiun ke 13

Jumlah pembayaran Pensiun ke 13 periode 31 Desember 2021 sebesar Rp7.715.995.485.523,- jika dibandingkan pembayaran Pensiun 13 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp627.789.196.999,- atau naik 8,86%.

k. Tunjangan Hari Raya (THR)

Jumlah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) periode 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp7.661.024.271.724,- jika dibandingkan pembayaran THR pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp721.271.075.082,- atau naik 10,39%.

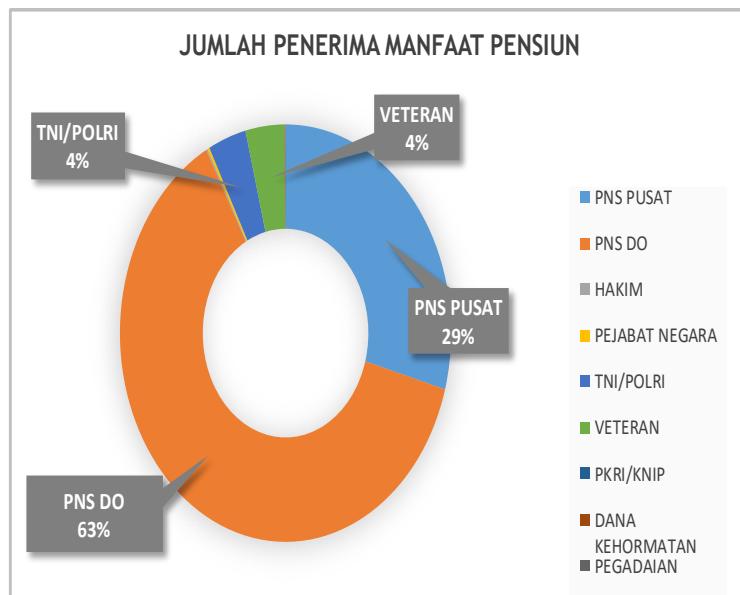
l. Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan

Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan 31 Desember 2021 sebesar Rp390.376.903.103,- merupakan penerimaan kembali penyaluran Manfaat Pensiun karena tidak berhak namun telah dipertanggungjawabkan pada tahun sebelumnya.

m. Manfaat Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI

Jumlah peserta Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI 31 Desember 2021 sebanyak 25.138 orang dengan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp881.267.862.901,- mencapai 96,04% dan 90,45%. Pembayaran Manfaat Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI mendasari PP Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PMK 1170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetorkan Past Service Liability ke PT TASPEN (Persero) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp79.500.000.000,- per tahun. Dan pada saat program penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub berakhir, Akumulasi Dana Pensiun ex PNS Dephub pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Grafik : 3
Jumlah Penerima Manfaat Pensiun 31 Desember 2021



Gambaran jumlah penerima manfaat pensiun menurut jenis pensiun dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

Tabel 26
Jumlah Penerima dan Pembayaran Manfaat Pensiun Menurut Jenis Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

JENIS PENERIMA PENSIUN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021 (5=3/2)	% Naik/Turun (6=3/4)
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
PNS dan Pejabat Negara					
1 Sendiri	1.809.878	1.733.708	1.700.790	95,79	1,94
2 Janda/Duda	1.082.936	1.045.578	1.050.354	96,55	(0,45)
3 Yatim/Piatu	46.529	42.402	40.668	91,13	4,26
4 Orang Tua	206	208	226	100,93	(7,96)
Sub Jumlah	2.939.550	2.821.896	2.792.038	100,93	(7,96)
Eks PNS Dephub pada PT KAI					
1 Sendiri	17.354	16.335	17.606	94,13	(7,22)
2 Janda/Duda	8.668	8.638	8.312	99,66	3,92
3 Yatim/Piatu	152	165	163	108,35	1,23
4 Orang Tua	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	26.175	25.138	26.081	96,04	(3,62)
Jumlah	2.965.724	2.847.034	2.818.119	96,00	1,03

Sumber: Accounting Division & Actuary Division

Jumlah penerima manfaat pensiun pada 31 Desember 2021 sebanyak 2.847.034 orang, mencapai 96% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebanyak 28.915 orang atau naik 1,03%. Peningkatan terbesar terjadi pada Pensiun Sendiri PNS dan Pejabat Negara yang mengalami peningkatan sebanyak 32.918 orang atau naik 1,94%. Sedangkan untuk Pensiun Janda/Duda mengalami penurunan sebanyak 4.776 orang atau turun 0,45%.

Rekapitulasi jumlah penerima manfaat pensiun menurut kelompok pensiun dan rekapitulasi jumlah penerima manfaat pensiun menurut jenis pensiun pada masing-masing Kantor Cabang dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

**Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)**

**Tabel 27
Jumlah Penerima Manfaat Pensiun
Menurut Kelompok Pensiun Pada Kantor Cabang
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

NO	NAMA CABANG	31 Desember 2021(Audited)										
		PNS PUSAT	PNS DO	HAKIM	PEJ. NEGARA	TNI/POL	VETERAN	PKRI/KNIP	DAHOR	PEGADAIAN	PT KAI	TOTAL
1	100 JAKARTA	53.451	42.548	305	1.361	5.624	3.204	55	71	20	646	107.285
2	101 BANDAR LAMPUNG	15.443	46.671	87	79	1.939	1.179	5	27	2	906	66.338
3	102 Bengkulu	5.025	18.192	25	52	474	163	-	1	-	1	23.933
4	103 PALEMBANG	13.378	37.998	86	74	1.769	647	-	6	2	1.070	55.030
5	104 PALANGKARAYA	5.505	23.332	18	71	438	1.288	-	47	1	-	30.700
6	105 PONTIANAK	7.941	34.877	18	89	836	566	-	1	2	-	44.330
7	106 PANGKAL PINANG	1.564	7.841	5	29	211	26	-	-	4	1	9.681
8	107 TANGERANG	23.775	16.929	83	171	844	359	4	10	-	146	42.321
9	108 TARAKAN	607	3.464	-	15	98	712	-	5	-	-	4.901
10	109 JAKARTASELATAN	19.785	10.635	87	766	1.772	1.326	13	34	1	74	34.493
11	110 LUBUK LINGGAU	2.657	13.180	17	14	514	275	1	2	1	764	17.425
12	200 MEDAN	23.643	57.796	183	125	4.318	2.069	-	51	9	1.849	90.043
13	201 BANDA ACEH	8.772	25.550	75	85	1.307	5.112	-	127	4	3	41.035
14	202 PEMATANG Siantar	11.519	44.369	34	37	1.235	1.484	2	12	6	260	58.958
15	203 BUKITTINGGI	10.018	19.697	72	32	1.013	920	8	14	4	126	31.904
16	204 PADANG	16.958	31.784	85	72	1.269	1.597	23	11	5	805	52.609
17	205 PEKANBARU	12.106	28.412	52	71	633	530	2	-	1	4	41.811
18	206 JAMBI	7.979	27.393	45	59	786	594	1	4	2	2	36.865
19	207 TANJUNG PINANG	4.226	5.177	4	27	206	306	-	-	-	-	9.946
20	208 LHOKSEUMAWE	4.736	18.714	32	27	825	3.303	-	151	2	2	27.792
21	209 KEPULAUAN NIAS	1.016	4.857	-	8	34	25	-	-	-	-	5.940
22	300 BANDUNG	50.835	70.569	194	276	10.702	6.756	21	37	24	2.592	142.006
23	301 BOGOR	31.697	39.131	60	120	4.630	3.560	22	29	8	622	79.879
24	302 TASIKMALAYA	18.108	43.729	50	33	4.456	6.179	17	8	26	897	73.503
25	303 CIREBON	14.564	37.014	53	32	2.185	3.322	1	7	33	834	58.045
26	304 SERANG	10.794	22.227	31	30	988	1.292	5	22	4	280	35.673
27	305 DEPOK	16.081	8.115	39	102	1.028	1.143	1	10	4	387	26.910
28	306 BEKASI	23.715	24.753	84	140	1.828	1.495	5	3	7	686	52.716
29	400 SEMARANG	50.044	96.454	224	178	5.242	3.901	9	13	61	2.139	158.265
30	401 PURWOKERTO	32.824	60.797	94	48	4.049	2.584	6	3	28	1.696	102.129
31	402 SURAKARTA	30.625	67.202	131	73	3.135	3.699	9	31	31	811	105.747
32	403 YOGYAKARTA	34.706	52.951	227	133	2.646	2.288	2	19	35	1.237	94.244
33	404 PEKALONGAN	13.118	37.689	59	37	1.500	1.996	-	14	22	681	55.116
34	500 SURABAYA	43.422	68.260	231	177	7.309	6.924	14	29	43	2.211	128.620
35	501 MALANG	19.227	48.802	120	92	4.901	3.566	8	13	39	924	77.692
36	502 MADIUN	15.979	39.348	39	31	2.302	1.895	18	2	22	720	60.356
37	503 KEDIRI	17.881	50.360	49	40	3.213	2.797	42	7	26	790	75.205
38	505 BANJARMASIN	12.914	35.543	92	99	1.614	1.077	1	14	1	-	51.355
39	506 SAMARINDA	5.430	23.771	24	60	852	415	-	4	1	1	30.558
40	507 ENDE	2.977	18.172	1	30	159	25	-	-	-	-	21.364
41	508 PAMEKASAN	8.852	17.994	15	22	502	1.149	14	1	10	63	28.622
42	600 MAKASSAR	25.826	52.619	181	180	3.886	5.957	4	178	4	-	88.835
43	601 MANADO	13.694	32.862	28	73	2.007	2.372	1	50	2	-	51.089
44	602 PALU	7.057	26.015	15	48	512	246	1	2	1	2	33.899
45	603 KENDARI	5.303	26.914	22	58	575	516	-	4	-	-	33.392
46	604 AMBON	6.402	19.040	15	30	810	1.525	1	22	5	-	27.850
47	605 JAYAPURA	3.772	20.483	7	61	315	585	34	9	-	-	25.266
48	606 GORONTALO	3.024	9.814	9	30	178	48	-	-	1	-	13.104
49	607 TERNATE	1.790	8.258	7	28	245	150	-	1	-	-	10.479
50	608 MAMUJU	2.604	9.195	7	18	363	837	-	132	-	-	13.156
51	609 MANOKWARI	1.834	8.714	2	34	175	341	44	1	-	-	11.145
52	610 PALOPO	4.159	12.741	10	13	1.165	2.432	-	220	-	-	20.740
53	611 BONE	5.213	14.355	26	14	694	991	-	8	-	-	21.301
54	700 DENPASAR	15.006	43.107	93	101	1.245	3.625	-	17	3	3	63.200
55	701 KUPANG	7.075	32.551	12	100	520	4.039	8	78	1	-	44.384
56	702 MATARAM	10.247	35.650	30	73	599	544	1	2	5	1	47.152
57	504 JEMBER	11.352	34.745	46	29	2.035	1.521	20	21	26	902	50.697
												-
	Jumlah	828.255	1.769.360	3.640	5.907	104.710	107.477	423	1.585	539	25.138	2.847.034

**Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)**

NO	NAMA CABANG	31 Desember 2020 (Audited)										% Naik/ Turun	
		PNS PUSAT	PNS DO	HAKIM	PEJ. NEGARA	TNI/POL	VETERAN	PKRI/KNIP	DAHOR	PEGADAIAN	PT KAI		
1	100 JAKARTA	54.994	41831	309	1.436	6.492	3.493	62	99	23	677	109.416	(1,95)
2	101 BANDAR LAMPUNG	15.939	43456	86	71	2.237	1.331	6	32	2	914	64.074	3,53
3	102 BENGKULU	5.056	16968	23	50	550	192	-	1	-	2	22.842	4,78
4	103 PALEMBANG	13.677	35931	92	78	2.076	767	2	7	2	1.091	53.723	2,43
5	104 PALANGKARAYA	5.648	21779	16	77	504	1.349	-	62	1	-	29.436	4,29
6	105 PONTIANAK	8.064	32644	18	83	939	609	-	2	2	-	42.361	4,65
7	106 PANGKAL PINANG	1.609	7207	5	25	240	32	-	1	4	1	9.124	6,10
8	107 TANGERANG	23.829	16115	81	173	976	408	5	18	-	151	41.756	1,35
9	108 TARAKAN	619	3200	-	11	110	719	-	4	-	-	4.663	5,10
10	109 JAKARTA SELATAN	20.027	9981	92	796	1.990	1.435	14	44	1	72	34.452	0,12
11	110 LUBUK LINGGAU	2.948	12437	16	14	630	360	1	2	1	781	17.190	1,37
12	200 MEDAN	24.343	55103	178	123	5.080	2.373	1	71	12	1.907	89.191	0,96
13	201 BANDA ACEH	9.069	24151	74	92	1.539	5.873	-	178	4	3	40.983	0,13
14	202 PEMATANG Siantar	12.322	41745	33	37	1.421	1.748	3	21	8	264	57.602	2,35
15	203 BUKITTINGGI	10.608	18161	57	27	1.162	1.127	8	19	4	125	31.298	1,94
16	204 PADANG	17.467	29758	85	71	1.452	1.871	29	17	5	806	51.561	2,03
17	205 PEKANBARU	12.520	25786	47	69	734	573	3	-	1	3	39.736	5,22
18	206 JAMBI	8.071	25335	45	63	874	706	1	6	2	1	35.104	5,02
19	207 TANJUNG PINANG	4.512	4866	5	25	242	332	-	-	-	-	9.982	(0,36)
20	208 LHOKSEUMAWE	4.977	17914	29	32	983	3.587	-	230	2	3	27.757	0,13
21	209 KEPULAUAN NIAS	1.080	4538	-	7	34	32	-	-	-	-	5.691	4,38
22	300 BANDUNG	53.583	67447	197	288	12.357	7.676	23	53	26	2.687	144.337	(1,61)
23	301 BOGOR	32.492	37272	59	125	5.272	4.081	23	37	15	648	80.024	(0,18)
24	302 TASIKMALAYA	19.475	41786	45	35	5.054	6.914	25	16	28	930	74.308	(1,08)
25	303 CIREBON	15.687	35480	49	30	2.543	3.772	1	12	39	895	58.508	(0,79)
26	304 SERANG	11.418	20915	33	28	1.153	1.468	7	25	4	294	35.345	0,93
27	305 DEPOK	16.187	7932	40	98	1.182	1.231	1	12	4	406	27.093	(0,68)
28	306 BEKASI	23.791	23366	81	142	2.082	1.639	6	6	8	725	51.846	1,68
29	400 SEMARANG	53.002	91702	213	180	6.048	4.470	11	23	73	2.245	157.967	0,19
30	401 PURWOKERTO	34.860	57998	86	46	4.582	2.882	7	7	32	1.742	102.242	(0,11)
31	402 SURAKARTA	32.530	64369	122	65	3.548	4.260	10	48	34	845	105.831	(0,08)
32	403 YOGYAKARTA	35.469	51027	207	136	2.997	2.527	2	28	38	1.250	93.681	0,60
33	404 PEKALONGAN	14.100	35831	54	38	1.752	2.300	-	23	29	720	54.847	0,49
34	500 SURABAYA	45.792	64542	222	188	8.458	7.476	16	46	52	2.301	129.093	(0,37)
35	501 MALANG	20.108	46794	121	94	5.661	3.939	8	23	47	981	77.776	(0,11)
36	502 MADIUN	17.061	37498	39	29	2.589	2.084	23	4	23	742	60.092	0,44
37	503 KEDIRI	19.328	48384	51	38	3.683	3.048	50	16	29	844	75.471	(0,35)
38	505 BANJARMASIN	13.245	33505	80	97	1.846	1.205	1	20	1	-	50.000	2,71
39	506 SAMARINDA	5.463	22172	22	56	952	450	-	5	1	1	29.122	4,93
40	507 ENDE	3.219	17906	2	28	180	27	-	-	1	-	21.363	0,00
41	508 PAMEKASAN	9.709	17253	15	22	588	1.347	18	2	12	66	29.032	(1,41)
42	600 MAKASSAR	26.472	50033	171	185	4.419	6.695	4	222	4	-	88.205	0,71
43	601 MANADO	14.071	31554	28	78	2.295	2.510	1	59	2	-	50.598	0,97
44	602 PALU	7.191	24562	14	47	569	226	-	3	1	2	32.615	3,94
45	603 KENDARI	5.281	25472	22	57	650	564	-	7	-	-	32.053	4,18
46	604 AMBON	6.568	17878	18	30	930	1.627	1	29	5	-	27.086	2,82
47	605 JAYAPURA	3.718	19716	6	62	351	644	40	10	-	-	24.547	2,93
48	606 GORONTALO	3.104	9311	7	26	197	57	-	-	1	-	12.703	3,16
49	607 TERNATE	1.810	7804	7	27	285	161	-	1	-	-	10.095	3,80
50	608 MAMUJU	2.712	8548	7	19	395	930	-	151	-	-	12.762	3,09
51	609 MANOKWARI	1.807	8281	2	33	190	381	48	2	-	-	10.744	3,73
52	610 PALOPO	4.326	12178	12	15	1.289	2.781	-	263	-	-	20.864	(0,59)
53	611 BONE	5.525	13502	24	13	792	1.128	-	9	-	-	20.993	1,47
54	700 DENPASAR	15.028	39904	89	99	1.402	4.139	-	24	3	4	60.692	4,13
55	701 KUPANG	7.108	30942	12	95	570	3.941	8	89	1	-	42.766	3,78
56	702 MATARAM	10.331	33211	32	72	667	592	1	2	5	-	44.913	4,99
57	504 JEMBER	12.091	33415	40	26	2.324	1.635	24	27	29	952	50.563	0,27
Jumlah		861.041	1.678.396	3.520	6.007	120.117	119.724	494	2.118	621	26.081	2.818.119	1,03

**Tabel 28
Jumlah Penerima Manfaat Pensiun
Menurut Jenis Pensiun Pada Kantor Cabang
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

NO	NAMA CABANG	31 Desember 2021 (Audited)				
		SENDIRI	JD/DD	YP	ORTU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	100 JAKARTA	67.387	39100	791	7	107.285
2	101 BANDAR LAMPUNG	43.435	21770	1.127	6	66.338
3	102 BENGKULU	16.362	7050	520	1	23.933
4	103 PALEMBANG	35.881	18350	797	2	55.030
5	104 PALANGKARAYA	19.276	10694	729	1	30.700
6	105 PONTIANAK	28.302	15139	886	3	44.330
7	106 PANGKAL PINANG	6.500	2932	247	2	9.681
8	107 TANGERANG	27.459	14341	518	3	42.321
9	108 TARAKAN	3.205	1560	135	1	4.901
10	109 JAKARTASELATAN	21.966	12335	192	-	34.493
11	110 LUBUK LINGGAU	11.205	5888	330	2	17.425
12	200 MEDAN	53.822	34872	1.346	3	90.043
13	201 BANDA ACEH	23.562	16146	1.321	6	41.035
14	202 PEMATANG Siantar	33.576	24324	1.054	4	58.958
15	203 BUKITTINGGI	21.134	10146	619	5	31.904
16	204 PADANG	34.824	16802	978	5	52.609
17	205 PEKANBARU	26.433	14129	1.246	3	41.811
18	206 JAMBI	23.660	12441	763	1	36.865
19	207 TANJUNG PINANG	6.544	3124	277	1	9.946
20	208 LHOKSEUMAWE	15.380	11410	1.001	1	27.792
21	209 KEPULAUAN NIAS	2.420	3263	257	-	5.940
22	300 BANDUNG	83.666	56978	1.353	9	142.006
23	301 BOGOR	45.371	33398	1.108	2	79.879
24	302 TASIKMALAYA	41.370	30980	1.145	8	73.503
25	303 CIREBON	32.119	24754	1.168	4	58.045
26	304 SERANG	19.970	14994	709	-	35.673
27	305 DEPOK	16.863	9753	294	-	26.910
28	306 BEKASI	32.561	19416	736	3	52.716
29	400 SEMARANG	98.558	58388	1.305	14	158.265
30	401 PURWOKERTO	63.458	37751	906	14	102.129
31	402 SURAKARTA	66.787	38165	790	5	105.747
32	403 YOGYAKARTA	63.260	30390	587	7	94.244
33	404 PEKALONGAN	32.356	21962	796	2	55.116
34	500 SURABAYA	76.513	50890	1.207	10	128.620
35	501 MALANG	45.822	31099	764	7	77.692
36	502 MADIUN	37.664	22177	511	4	60.356
37	503 KEDIRI	46.123	28374	702	6	75.205
38	505 BANJARMASIN	30.132	20120	1.102	1	51.355
39	506 SAMARINDA	19.060	10689	808	1	30.558
40	507 ENDE	14.125	6956	282	1	21.364
41	508 PAMEKASAN	15.077	13081	464		28.622
42	600 MAKASSAR	54.429	32854	1.535	17	88.835
43	601 MANADO	33.883	16616	585	5	51.089
44	602 PALU	20.391	12362	1.144	2	33.899
45	603 KENDARI	20.347	11857	1.185	3	33.392
46	604 AMBON	17.169	10082	598	1	27.850
47	605 JAYAPURA	13.633	10802	831		25.266
48	606 GORONTALO	8.294	4248	562	-	13.104
49	607 TERNATE	5.795	4238	446	-	10.479
50	608 MAMUJU	7.688	5108	358	2	13.156
51	609 MANOKWARI	5.915	4864	366	-	11.145
52	610 PALOPO	12.721	7697	319	3	20.740
53	611 BONE	13.204	7665	431	1	21.301
54	700 DENPASAR	45.095	17858	238	9	63.200
55	701 KUPANG	29.216	14515	651	2	44.384
56	702 MATARAM	29.776	16467	907	2	47.152
57	504 JEMBER	29.299	20852	540	6	50.697
	Jumlah	1.750.043	1.054.216	42.567	208	2.847.034

Sumber: Membership Division

*Bab III - Laporan Administrasi Dana Belanja Pensiun APBN -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)*

NO	NAMA CABANG	31 Desember 2020 (Audited)					% Naik/ Turun
		SENDIRI	JD/DD	YP	ORTU	JUMLAH	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=8+9+10+11 (13=7/12)	
1 100	JAKARTA	68.651	39995	763	7	109.416	(1,95)
2 101	BANDAR LAMPUNG	41.466	21518	1.083	7	64.074	3,53
3 102	BENGKULU	15.446	6906	489	1	22.842	4,78
4 103	PALEMBANG	34.822	18147	752	2	53.723	2,43
5 104	PALANGKARAYA	18.435	10280	720	1	29.436	4,29
6 105	PONTIANAK	26.948	14599	810	4	42.361	4,65
7 106	PANGKAL PINANG	6.055	2841	226	2	9.124	6,10
8 107	TANGERANG	27.310	13983	460	3	41.756	1,35
9 108	TARAKAN	3.018	1507	137	1	4.663	5,10
10 109	JAKARTASELATAN	21.912	12359	181	-	34.452	0,12
11 110	LUBUK LINGGAU	10.742	6136	310	2	17.190	1,37
12 200	MEDAN	52.480	35425	1.283	3	89.191	0,96
13 201	BANDA ACEH	23.143	16543	1.291	6	40.983	0,13
14 202	PEMATANG Siantar	32.211	24421	965	5	57.602	2,35
15 203	BUKITTINGGI	20.382	10317	594	5	31.298	1,94
16 204	PADANG	33.820	16784	953	4	51.561	2,03
17 205	PEKANBARU	24.866	13650	1.216	4	39.736	5,22
18 206	JAMBI	22.228	12159	716	1	35.104	5,02
19 207	TANJUNG PINANG	6.229	3480	273	-	9.982	(0,36)
20 208	LHOKSEUMAWE	15.098	11684	974	1	27.757	0,13
21 209	KEPULAUAN NIAS	2.274	3179	238	-	5.691	4,38
22 300	BANDUNG	84.120	58913	1.294	10	144.337	(1,61)
23 301	BOGOR	44.991	34044	987	2	80.024	(0,18)
24 302	TASIKMALAYA	41.219	31934	1.145	10	74.308	(1,08)
25 303	CIREBON	32.146	25216	1.144	2	58.508	(0,79)
26 304	SERANG	19.597	15074	674	-	35.345	0,93
27 305	DEPOK	17.166	9670	257	-	27.093	(0,68)
28 306	BEKASI	32.206	18965	672	3	51.846	1,68
29 400	SEMARANG	97.817	58812	1.319	19	157.967	0,19
30 401	PURWOKERTO	63.207	38113	907	15	102.242	(0,11)
31 402	SURAKARTA	66.645	38389	792	5	105.831	(0,08)
32 403	YOGYAKARTA	62.593	30482	596	10	93.681	0,60
33 404	PEKALONGAN	32.107	21994	744	2	54.847	0,49
34 500	SURABAYA	76.671	51289	1.123	10	129.093	(0,37)
35 501	MALANG	45.569	31501	699	7	77.776	(0,11)
36 502	MADIUN	37.334	22246	507	5	60.092	0,44
37 503	KEDIRI	45.679	29099	684	9	75.471	(0,35)
38 505	BANJARMASIN	29.090	19782	1.126	2	50.000	2,71
39 506	SAMARINDA	18.052	10303	766	1	29.122	4,93
40 507	ENDE	13.405	7673	285	-	21.363	0,00
41 508	PAMEKASAN	15.085	13498	449	-	29.032	(1,41)
42 600	MAKASSAR	53.681	32998	1.508	18	88.205	0,71
43 601	MANADO	33.369	16652	572	5	50.598	0,97
44 602	PALU	19.561	12002	1.050	2	32.615	3,94
45 603	KENDARI	19.287	11642	1.121	3	32.053	4,18
46 604	AMBON	16.473	10031	581	1	27.086	2,82
47 605	JAYAPURA	13.162	10583	802	-	24.547	2,93
48 606	GORONTALO	8.074	4108	521	-	12.703	3,16
49 607	TERNATE	5.587	4085	423	-	10.095	3,80
50 608	MAMUJU	7.416	5005	340	1	12.762	3,09
51 609	MANOKWARI	5.771	4643	330	-	10.744	3,73
52 610	PALOPO	12.681	7886	294	3	20.864	(0,59)
53 611	BONE	12.794	7782	416	1	20.993	1,47
54 700	DENPASAR	42.807	17645	230	10	60.692	4,13
55 701	KUPANG	28.325	13810	629	2	42.766	3,78
56 702	MATARAM	28.074	15933	903	3	44.913	4,99
57 504	JEMBER	29.099	20951	507	6	50.563	0,27
Jumlah		1.718.396	1.058.666	40.831	226	2.818.119	1,03

Sumber: Membership Division

B. Penyelesaian Klaim

Realisasi penyelesaian klaim Program Pensiun pada 31 Desember 2021 sebanyak 678.857 kejadian mencapai 123,91% dari RKA Tahun 2021, sementara capaian realisasi pembayaran sebesar Rp4.168.959.639.410,- mencapai 129,53% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 170.176 kejadian dengan peningkatan pembayaran klaim sebesar Rp1.114.843.313.540,- atau naik 33,45% dan 36,50%. Kontribusi peningkatan atas kejadian dan pembayaran klaim diantaranya dialami oleh kelompok Uang Duka Wafat (SP2UDW) yang meningkat sebanyak 70.831 kejadian dan pembayaran sebesar Rp584.206.357.087,- atau naik 58,77% dan 65,69% begitu juga kelompok Pensiun Janda Duda (SP4B) yang meningkat sebanyak 30.877 kejadian dan pembayaran sebesar Rp143.130.706.324,- atau naik 44,36% dan 42,67%.

Secara ringkas Rincian Penyelesaian dan Realisasi Pembayaran Klaim Pensiun 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29
Jumlah Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Pensiun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KELOMPOK PENERIMA	RKA 2021		Realisasi				% Pencapaian 2021		% Naik/Turun	
			31 Desember 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited)					
	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Klim	Jumlah Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4/2)	(9)=(5/3)	(10)=(4/6)	(11)=(7/5)
1 Pensiun Pertama Sendiri (SP4A)	155.277	1.135.898.030.172	158.688	1.197.812.217.556	159.299	1.092.651.127.850	102,20	105,45	(0,38)	9,62
2 Pensiun Janda Duda (SP4B)	74.259	342.978.304.404	100.475	478.534.322.792	69.598	335.403.616.468	135,30	139,52	44,36	42,67
3 Pensiun Yatim Piatu (YP)	5.077	95.531.916.846	7.854	144.385.861.072	5.868	58.583.770.800	154,69	151,14	33,84	146,46
4 Pensiun 3 Bulan Tidak Diambil (SP3B)	31.063	129.095.139.316	30.937	176.087.947.128	15.583	65.743.142.300	99,59	136,40	98,53	167,84
5 Uang Duka Wafat (SP2UDW)	131.038	890.286.793.409	191.345	1.473.500.380.487	120.514	889.294.023.400	146,02	165,51	58,77	65,69
6 Uang Kekurangan Pensiun (SP2UKP)	10.659	32.128.384.424	4.646	14.780.399.397	4.220	26.435.977.850	43,59	46,00	10,09	(44,09)
7 Pensiun Lanjutan (SP3L)	40.780	212.103.350.601	45.013	233.609.257.513	35.150	224.698.718.606	110,38	110,14	28,06	3,97
8 SP3IP	3.807	154.214.852.326	2.669	105.667.168.768	3.634	133.193.906.589	70,11	68,52	(26,55)	(20,67)
9 Dana Kehormatan	1.540	1.561.026.405	59	20.516.478.000	108	363.194.000	3,83	1.314,29	(45,37)	5.548,90
10 Pensiun 13	47.061	109.604.478.137	89.143	219.401.845.393	34.109	76.130.930.073	189,42	200,18	161,35	188,19
11 THR	47.303	115.172.186.842	48.028	104.663.761.304	60.598	151.617.917.934	101,53	90,88	(20,74)	(30,97)
JUMLAH	547.864	3.218.574.462.882	678.857	4.168.959.639.410	508.681	3.054.116.325.870	123,91	129,53	33,45	36,50

Exclude : Klaim Eks PNS Dephub pada PT KAI

Sumber : Actuary Division, Membership Division, Accounting Division

C. Jumlah Aset atau Liabilitas serta Sisa Dana Belanja Pensiun

Jumlah Aset atau Liabilitas serta sisa dana belanja pensiun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.902.142.871.473,- mencapai 93,57% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp164.751.608.362,- atau naik sebesar 1,89%.

Sebagai gambaran atas laporan administratif Dana Belanja Pensiun APBN dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 30
Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun APBN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	Rupiah % Naik/Turun (6=3/4)
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	
1. ASET					
Kas dan Bank					
- Kas	2.740.311	1.655.200	2.298.900	60,40	(28,00)
- Bank	666.190.839.457	709.103.982.260	629.447.478.505	106,44	12,65
Piutang Saldo Uang Pensiun	-	-	177.117.839	-	(100,00)
Piutang Kepada Pemerintah	-	254.186.998	53.240.635.530	-	(99,52)
Piutang Lain-lain	6.060.407	21.355.929	-	352,38	-
Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka	8.116.213.786.706	7.713.638.116.383	7.514.769.199.748	95,04	2,65
Manfaat Pensiun Belum Otentikasi	731.112.341.510	479.123.574.703	539.754.532.589	65,53	(11,23)
Jumlah Aset	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89
2. LIABILITAS					
Utang Manfaat Pensiun	9.129.947.627	15.097.666.832	8.257.090.500	165,36	82,84
Utang Kepada Pemerintah	7.265.562.689	45.645.964.804	27.003.540.818	628,25	69,04
Utang kepada Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	7.363.678.773.800	93,21	2,74
Utang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	-	12.184.400	-	-	-
Utang Potongan Penyaluran Dapem	187.457.867.983	316.304.528.765	290.538.523.834	168,73	8,87
Utang Jasa Giro	3.093.554.398	2.617.732.565	1.673.661.600	84,62	56,41
Utang Lain-lain	9.574.583	9.020.950	9.118.650	94,22	(1,07)
Jumlah Liabilitas	8.323.170.293.985	7.944.998.422.616	7.691.160.709.202	95,46	3,30
3. Sisa Dana Belanja Pensiun Tahun Lalu	1.190.355.474.406	1.046.230.553.909	1.190.355.474.406	87,89	(12,11)
4. Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan					
Penambahan					
- Penerimaan Dana Pemerintah	111.399.012.758.709	111.470.127.938.004	105.018.102.884.443	100,06	6,14
- Pendapatan Lain-lain	-	2.640	9.504	-	(72,22)
Jumlah Penambahan	111.399.012.758.709	111.470.127.940.644	105.018.102.893.947	100,06	6,14
Pengurangan					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	111.048.830.473.752	110.625.678.456.322	104.723.380.550.548	99,62	5,64
- Pengembalian Dana Pemerintah	350.182.284.957	933.535.589.374	438.847.263.896	266,59	112,72
Jumlah Pengurangan	111.399.012.758.709	111.559.214.045.696	105.162.227.814.444	100,14	6,08
Saldo Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan	-	(89.086.105.052)	(144.124.920.497)	-	(38,19)
5. Sisa Dana Belanja Pensiun	1.190.355.474.406	957.144.448.857	1.046.230.553.909	80,41	(8,51)
6. Jumlah Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89

Sumber : Accounting Division

1. Aset

a. Kas dan Bank

Pada 31 Desember 2021 saldo masing-masing kas dan bank sebesar Rp1.655.200,- dan Rp709.103.982.260,- .

b. Piutang Saldo Uang Pensiun

Piutang Saldo Uang Pensiun merupakan penyaluran manfaat pensiun kepada Mitra Bayar Perbankan, yang belum diambil atau belum diautentikasi oleh penerima pensiun selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Piutang Saldo Uang Pensiun (PSUP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp177.117.839,-.

c. Piutang kepada Pemerintah

Piutang kepada pemerintah merupakan tagihan kekurangan dropping dana belanja pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun yang disetorkan ke PT TAS PEN (Persero) setiap bulan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PT TAS PEN (Persero) dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Piutang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp254.186.998,- dan 31 Desember 2020 sebesar Rp53.240.635.530.

d. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka

Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.713.638.116.383,- dan Rp 7.514.769.199.748,-. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka merupakan manfaat pensiun bulan berikutnya yang disalurkan kepada mitra bayar pensiun pada bulan berkenaan untuk dibayarkan kepada penerima pensiun.

e. Manfaat Pensiun Belum Diotentikasi

Manfaat Manfaat Pensiun Belum Diotentikasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp479.123.574.703,- dan 31 Desember 2020 sebesar Rp539.754.532.589,- yang merupakan penyaluran manfaat pensiun kepada Mitra Bayar, yang belum diambil atau belum Diautentikasi oleh penerima pensiun selama mulai dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut.

2. Liabilitas

a. Utang Manfaat Pensiun

Utang Manfaat Pensiun pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.097.666.832,- dan Rp8.257.090.500,- merupakan kewajiban yang timbul diantaranya atas Saldo Uang Pensiun (SUP) yang disetor mitra pada akhir periode laporan akibat penerimaan kembali Dana Belanja Pensiun dari Mitra Bayar karena uang pensiun tidak diambil oleh penerima pensiun, penerima pensiun meninggal dunia atau tidak berhak. Utang tersebut akan berkurang apabila diajukan kembali oleh penerima pensiun atau dikembalikan kepada Pemerintah (disetor ke Kas Negara atau melalui mekanisme kompensasi).

b. Utang kepada Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) PNS

Utang kepada Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) PNS pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.565.311.324.300,- merupakan penggunaan dana AIP PNS (talangan) untuk penyaluran Dapem Bulanan Januari 2022 yang dilakukan pada akhir tahun 2021 karena dropping dana dari APBN baru dapat dilakukan pada bulan Januari 2022 sesuai dengan sumber pembiayaannya yang berasal dari APBN tahun 2022

berdasarkan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-223/PB.7/2021 tanggal 7 November 2021 perihal Dana Talangan Pembayaran Manfaat Pensiun bulan Januari 2022.

c. Utang Potongan Penyaluran Dapem

Utang Potongan Penyaluran Dapem pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp316.304.528.765,- dan Rp290.538.523.834,- yang terdiri dari potongan atas utang pajak, utang kepada BPJS Kesehatan, Utang Kepada Kas Negara, Utang Kepada Kas Daerah dan Utang Potongan Dapem Induk.

3. Sisa Dana Belanja Pensiun Tahun Lalu

Sisa Dana Belanja Pensiun pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.046.230.553.909,- dan Rp1.190.355.474.406,- merupakan akumulasi dari sisa dana belanja pensiun tahun lalu.

4. Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan

- Penambahan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp111.470.127.940.644,- merupakan Penerimaan Dana Pemerintah dan Pendapatan lain-lain. Penerimaan Dana Pemerintah jika dibandingkan per 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.452.025.053.561,- atau naik 6,14%.
- Pengurangan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp111.559.214.045.696,- merupakan pembayaran manfaat pensiun dan pengembalian dana Pemerintah. Pengembalian dana pemerintah sejumlah Rp933.535.589.374,- merupakan Saldo Uang Pensiun (SUP) yang telah dikembalikan oleh mitra bayar kepada PT TASPE (Persero) karena penerima pensiun tidak berhak atau tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pengembalian dana kepada pemerintah dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Belanja Pensiun antara pihak Dirjen Perbendahaan dengan PT TASPE (Persero).
- Saldo Dana belanja pensiun tahun berjalan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar minus Rp89.086.105.052,- dan minus Rp144.124.920.497,-.

Sisa Dana Belanja Pensiun pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp957.144.448.857,- dan Rp1.046.230.553.909,-merupakan akumulasi dari sisa dana belanja pensiun tahun lalu dengan sisa dana belanja pensiun tahun berjalan.

D. Pembayaran Manfaat Pensiun APBN

Manfaat pensiun yang dibayarkan melalui Dana APBN pada 31 Desember 2021 sebesar Rp110.625.678.456.322,- mencapai 99,62% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan manfaat pensiun yang dibayarkan pada 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp5.902.297.905.774,- atau naik 5,64%. Kenaikan tersebut timbul pada pembayaran manfaat pensiun PNS sebesar Rp5.333.522.723.573,- Pensiun 13 sebesar Rp627.789.196.999,- dan THR sebesar Rp721.271.075.082,- pada 31 Desember 2020.

Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun APBN pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember Tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31
Pembayaran Manfaat Pensiun APBN
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

JENIS PENERIMA PENSIUN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun	Rupiah
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)	
a. Manfaat Pensiun Tahun Berjalan						
1. Manfaat Pensiun PNS	107.838.251.767.913	92.335.841.972.350	87.243.388.847.627	85,62	5,84	
2. Veteran dan PKRI	3.161.553.941.390	1.958.330.719.854	2.147.122.449.140	61,94	(8,79)	
3. Pegadaian	17.273.125.289	11.313.269.768	12.697.297.724	65,50	(10,90)	
4. Pensiun 13	-	7.715.995.485.523	7.088.206.288.524	-	1.129,16	
5. Dana Kehormatan	31.751.639.160	552.795.834.000	627.746.465.750	1.741,00	(92,20)	
6. THR	-	7.661.024.271.724	6.939.753.196.642	-	10,39	
Manfaat Pensiun Tahun Berjalan	111.048.830.473.752	110.235.301.553.219	104.058.914.545.407	99,27	5,94	
b. Manfaat Pensiun Sebelum Tahun Berjalan	-	390.376.903.103	664.466.005.141	-	(41,25)	
Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun APBN	111.048.830.473.752	110.625.678.456.322	104.723.380.550.548	99,62	5,64	

Sumber: Accounting Division

BAB IV

PENUTUP

A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Pertimbangan dan Dukungan Kementerian Keuangan.

Beberapa permasalahan pokok yang memerlukan pertimbangan Kementerian Keuangan antara lain:

1. RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (RPP JP & JHT)

RPP JP & JHT sedang dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) telah mengirimkan RPP JP & JHT usulan Kementerian PAN & RB kepada Menteri Hukum & HAM melalui surat Nomor B/1361/M.PANRB/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS. TASPERN juga telah menyusun RPP JP & JHT versi PT TASPERN (Persero) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan secara intensif. Pada tanggal 25 Juli 2016 melalui surat Nomor SRT-149/DIR.1/072016, PT TASPERN (Persero) telah mengusulkan sekaligus memaparkan RPP JP & JHT usulan PT TASPERN (Persero) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Proses penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua serta Kelembagaan TASPERN masih dalam tahap harmonisasi pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB. Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB masih melakukan pembahasan terkait tunjangan PNS yang akan dijadikan dasar pengenaan iuran. Dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Juni 2018, Presiden memberikan arahan antara lain agar Implementasi reformasi program pensiun PNS dilaksanakan pada tahun 2020 dan pembentukan lembaga baru yang merupakan konversi dari PT TASPERN (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi BUMN yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan pada tanggal 13-15 Maret 2020 di Bandung, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Jakarta Barat telah melakukan *Focus Group Discussion Uji Publik Reformasi Program Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil*, untuk membahas :

- a. Latar belakang perlunya reformasi program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS, serta pokok-pokok kebijakan yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB;
- b. Kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;
- c. Laporan atas penyelenggaraan pembayaran pensiun dan THT PNS sampai dengan sekarang;
- d. Kesiapan transformasi/konversi kelembagaan PT TASPERN (Persero) sebagai badan penyelenggara program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS dari segala aspek (teknologi informasi, SDM, manajemen investasi, dan sebagainya).

Setelah Uji Publik pembahasan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dilaksanakan dengan cukup intensif oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta PT TASPERN (Persero). RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua semula direncanakan akan selesai pada tahun 2021 untuk kemudian diimplementasikan. Namun

dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan untuk fokus pada penanganan Pandemi sehingga pelaksanaan reformasi Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua serta pembahasan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk sementara ditunda.

Terkait Progres penyusunan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, saat ini TASPERN telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 dan 16 Juni 2021 yang antara lain membahas implementasi pemberlakuan program JP dan JHT direncanakan pada tahun 2023/2024 sesuai kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional akibat Pandemi Covid-19.

2. Kepesertaan Honorer/ non PNS/ non PPPK dalam JKK dan JKM

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam Pasal 99 ayat (3) menyatakan: "Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK". Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) PP 49 Tahun 2018 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Non-PNS adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau PT TASPERN (Persero).

Pasal 99 ayat (4) PP No 49 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri PAN dan RB setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan telah memberikan pertimbangan teknis pada tanggal 29 Maret 2019 melalui Surat Nomor S-253/MK.02/2019 hal Pertimbangan Teknis atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS dan Non PPPK di lingkungan Instansi Pemerintah (RPermen PAN-RB JKK JKM) dan Menteri Keuangan telah mengusulkan agar Permen PAN dan RB menegaskan pengaturan PT TASPERN (Persero) sebagai Pengelola Program agar tidak menimbulkan kebingungan di tataran teknis.

PT TASPERN (Persero) sebagai lembaga pengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-PNS berdasarkan Pasal 99 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 2018 telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui pendapat hukum Nomor 35/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Nomor 57/Tuaka.TUN/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) tidak dapat mengelola JKK dan JKM bagi pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara tegas mengatur bahwa peserta program JKK dan JKM BPJS Tk adalah Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-ASN termasuk pegawai Honorer saat ini masih menunggu Peraturan Menteri PAN dan RB tentang JKK dan JKM tersebut disahkan. Adapun proses Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB saat ini dalam tahap Harmonisasi.

Pada tanggal 17 September 2021, Kementerian PAN RB melakukan FGD Harmonisasi Kebijakan Jaminan Sosial di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan para ahli. Dalam kajian menyatakan secara penalaran hukum, pasal-pasal dalam PP 49/2018 tentang

Manajemen PPPK mengamanatkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Non-PNS disamakan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana apabila merujuk pada PP 70/2015 maka pengelolaannya dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Kewenangan PT TASPEN (Persero) sebagai lembaga pengelola JKK dan JKM pun berdasarkan Pasal 7 PP 70/2015 telah diuji materiil dan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 PP 70/2015 tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Non-PNS dikelola oleh PT TASPEN (Persero).

3. Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Berbagai pihak memandang bahwa terdapat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Pasal tersebut antara lain Pasal 57 huruf e dan huruf f serta Pasal 65. Kedua Pasal tersebut antara lain mengatur tentang pengalihan Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Pasal-pasal terkait pengalihan tersebut sudah tidak relevan karena Jaminan Sosial bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Peraturan turunan UU ASN tersebut secara tegas menunjuk PT TASPEN (Persero) sebagai lembaga pengelola, antara lain tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.

PT TASPEN (Persero) telah diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk membahas terkait draf perubahan UU BPJS yang dirancang oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun pembahasan tersebut saat ini belum menemui perkembangan baru. Selain itu, UU BPJS khususnya Pasal 57 huruf e dan f dan Pasal 65 saat ini telah dilakukan Uji Materiil diajukan oleh PNS dan pensiunan PNS serta para Purnawirawan TNI. Apabila Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon Uji Materiil, maka Pasal-pasal yang dimohonkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum meskipun UU BPJS tidak dilakukan perubahan.

Dengan dikeluarkannya Putusan No 72/PUU-XVIII/2019 atas Uji Materiil UU BPJS dan pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) pada tanggal 30 September 2021 menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi penyelesaian klaim Pengembalian Manfaat Nilai Tunai yang dibayarkan melalui Dana Akumulasi Iuran Pensiun (DAIP) pada 31 Desember 2021 sebanyak 2.669 kejadian atau mencapai 70,11% dari RKA Tahun 2021 dengan nilai pembayarannya sebesar

Rp105.667.168.768,-. Jika dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 26,55% atau sebanyak 965 kejadian dan nilai pembayaran mengalami penurunan sebesar Rp28.360.006.298,- atau mengalami penurunan sebesar 21,16%.

2. Jumlah penerima manfaat pensiun pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 2.847.034 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp111.506.946.319.223,- mencapai masing-masingnya sebesar 96% dan 99,54% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebanyak 28.915 orang atau naik 1,03% begitu juga dengan jumlah pembayaran mengalami peningkatan sebesar Rp5.887.002.454.528,- atau naik 5,57%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pembayaran manfaat pensiun PNS DO sebesar Rp5.333.522.723.573,- Pensiun 13 sebesar Rp627.789.196.999,- dan THR sebesar Rp721.271.075.082,-.
3. Realisasi penyelesaian klaim Program Pensiun pada 31 Desember 2021 sebanyak 678.857 kejadian mencapai 123,91% dari RKA Tahun 2021, sementara capaian realisasi pembayaran sebesar Rp4.168.959.639.410,- mencapai 129,53% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 170.176 kejadian dengan peningkatan pembayaran klaim sebesar Rp1.114.843.313.540,- atau naik 33,45% dan 36,50%. Kontribusi peningkatan atas kejadian dan pembayaran klaim diantaranya dialami oleh kelompok Uang Duka Wafat (SP2UDW) yang meningkat sebanyak 70.831 kejadian dan pembayaran sebesar Rp584.206.357.087,- atau naik 58,77% dan 65,69% begitu juga kelompok Pensiun Janda Duda (SP4B) yang meningkat sebanyak 30.877 kejadian dan pembayaran sebesar Rp143.130.706.324,- atau naik 44,36% dan 42,67%.
4. Manfaat pensiun PNS dan Pejabat Negara yang dibayarkan melalui Dana APBN pada 31 Desember 2021 sebesar Rp110.625.678.456.322,- mencapai 99,62% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan manfaat pensiun yang dibayarkan pada 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp5.902.297.905.774,- atau naik 5,64%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pembayaran manfaat pensiun PNS sebesar Rp5.333.522.723.573,- Pensiun 13 sebesar Rp627.789.196.999,- dan THR sebesar Rp721.271.075.082,- pada 31 Desember 2020.
5. Aset Investasi Pada 31 Desember 2021 sebesar Rp180.022.728.373.743,- mencapai 103,20% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp18.276.102.993.582,- atau naik 11,30%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pembelian instrumen keuangan dengan memanfaatkan momentum pasar terutama pada nilai instrumen investasi Deposito, Surat Utang Negara, Sukuk Pemerintah dan Reksadana.
6. Hasil investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp12.798.057.842.003,- mencapai 101,01% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp25.497.780.316,- atau naik 0,20%.
7. Total Pengurangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara selama periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.675.129.975.259,- mencapai 97,17% dari RKA 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.052.379.277.695,- atau turun 80,81%.
8. Realisasi beban investasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp29.255.670.375,- atau mencapai 355,06% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020

- mengalami penurunan sebesar Rp20.922.783.289,- atau turun 41,70%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan beban *service charge* JMP Surabaya
9. Dana Bersih pada 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp189.639.517.831.246,- atau mencapai 102,71% dari RKA Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, terjadi peningkatan sebesar Rp18.193.774.795.719,- atau naik 10,61%.
10. Jumlah Aset atau Liabilitas serta sisa dana belanja pensiun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.902.142.871.473,- mencapai 93,57% dari RKA Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp164.751.608.362,- atau naik sebesar 1,89%.
11. Saldo Dana Belanja Pensiun
- Penambahan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp111.470.127.940.644,- merupakan Penerimaan Dana Pemerintah dan Pendapatan lain-lain. Penerimaan Dana Pemerintah jika dibandingkan per 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.452.025.053.561,- atau naik 6,14.
 - Pengurangan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp111.559.214.045.696,- merupakan pembayaran manfaat pensiun dan pengembalian dana Pemerintah. Pengembalian dana pemerintah sejumlah Rp933.535.589.374,- merupakan Saldo Uang Pensiun (SUP) yang telah dikembalikan oleh mitra bayar kepada PT TAS PEN (Persero) karena penerima pensiun tidak berhak atau tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pengembalian dana kepada pemerintah dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Belanja Pensiun antara pihak Dirjen Perbendahaan dengan PT TAS PEN (Persero).
 - Saldo Dana belanja pensiun tahun berjalan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar minus Rp89.086.105.052,- dan minus Rp144.124.920.497,-.

Sisa Dana Belanja Pensiun pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp957.144.448.857,- dan Rp1.046.230.553.909,- merupakan akumulasi dari sisa dana belanja pensiun tahun lalu dengan sisa dana belanja pensiun tahun berjalan.

LAMPIRAN

1-3

Bab IV - Penutup -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)

Lampiran 1

PT TASPEN (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN DANA BERSIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Rupiah

URAIAN	RKA 2021	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Pencapaian 2021	% Naik/ Turun (5=3/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1. ASET					
INVESTASI					
Deposito	18.089.980.526.840	33.307.100.000.000	25.330.800.000.000	184,12	31,49
Surat Utang Negara	70.592.872.964.187	82.259.363.927.530	79.360.369.199.668	116,53	3,65
Obligasi Korporasi	30.234.951.935.437	17.926.389.870.080	19.762.733.493.240	59,29	(9,29)
Sukuk Pemerintah	24.341.141.446.052	30.704.929.291.285	23.560.026.904.715	126,14	30,33
Sukuk Korporasi	3.283.831.887.457	105.702.473.250	82.583.442.400	3,22	27,99
Medium Term Notes	631.771.929.630	-	30.251.976.000	-	(100,00)
Reksadana	14.886.027.191.087	7.403.164.296.669	5.314.367.023.678	49,73	39,30
Saham	9.490.244.031.973	6.224.226.884.750	6.234.553.109.300	65,59	(0,17)
Penempatan Langsung	2.887.659.000.000	2.043.444.630.179	2.022.847.231.160	70,76	1,02
Tanah dan Bangunan	-	48.407.000.000	48.093.000.000	-	0,65
Jumlah Aset Investasi	174.438.480.912.663	180.022.728.373.743	161.746.625.380.161	103,20	11,30
ASET BUKAN INVESTASI					
Kas dan Bank :					
- Kas	3.093.992	693.660	1.019.460	22,42	(31,96)
- Bank	2.359.018.163	2.414.482.223	2.717.894.257	102,35	(11,16)
Piutang Iuran	44.062.394.550	35.280.505.734	25.008.884.789	80,07	41,07
Piutang Hasil Investasi	1.950.180.087.763	2.055.523.066.863	1.929.802.157.104	105,40	6,51
Piutang Pelepasan Investasi	-	-	3.602.316.977	-	(100,00)
Piutang Nilai Investasi	86.236.178.703	-	-	-	-
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	7.363.678.773.800	93,21	2,74
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub	52.240.968.132	40.319.777.315	-	77,18	-
Piutang Lain-lain	61.839.986.263	96.390.244.072	17.707.582.798	155,87	444,34
Aset Lancar Lainnya	-	-	1.697.237.500	-	(100,00)
Aset Operasional :					
Tanah	-	-	513.077.996.800	-	(100,00)
Bangunan	-	-	213.181.566.039	-	(100,00)
Kendaraan	132.900.000	132.900.000	132.900.000	100,00	-
Komputer	4.432.131.954	2.599.562.890	3.461.592.575	58,65	(24,90)
Inventaris Kantor	10.814.739.242	8.345.215.454	9.143.202.314	77,17	(8,73)
Aset Operasional Lain :					
- Aset Tetap Tidak Digunakan	361.613.523	181.679.736	306.270.823	50,24	(40,68)
- Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual	-	23.262.700	55.342.700	-	(57,97)
- Aset Tidak Berwujud	10.009.537.225	10.009.537.225	10.009.537.225	100,00	-
- Hak Guna Bangunan	30.388.630.149	27.594.863.465	30.388.630.149	90,81	(9,19)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(27.395.105.124)	(34.514.695.663)	(144.633.218.363)	125,99	(76,14)
Jumlah Aset Bukan Investasi	10.341.879.961.242	9.809.612.419.974	9.979.339.686.947	94,85	(1,70)
Jumlah Aset	184.780.360.873.904	189.832.340.793.717	171.725.965.067.108	102,73	10,54
2. KEWAJIBAN					
Utang Iuran	356.882.427	1.058.437.067	323.255.954	296,58	227,43
Utang Klim	-	290.273.600	-		
Utang Perolehan Investasi	-	-	35.562.483.388	-	(100,00)
Utang Pajak	-	251.040.267	336.674.655	-	(25,44)
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	-	75.350.000	-	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	109.432.436.580	89.089.748.065	-	22,83
Pendapatan Diterima Dimuka	5.913.173.283	-	3.331.124.550	-	(100,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	662.424.650	-	-	-
Utang Kepada Program THT	137.700.252.767	80.683.129.741	151.208.875.203	58,59	(46,64)
Utang Lain-lain	-	369.870.566	369.869.766	-	0,00
Jumlah Kewajiban	143.970.308.477	192.822.962.471	280.222.031.581	133,93	(31,19)
Jumlah Dana Bersih	184.636.390.565.427	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	102,71	10,61

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Dana Bersih Pensiun berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019

Bab IV - Penutup -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)

Lampiran 2

PT TASPEN (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	RKA 2021	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Pencapaian 2021	Rupiah % Naik/ Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1. PENAMBAHAN					
Hasil Investasi					
Bunga Deposito	1.333.865.862.314	1.923.401.178.367	2.157.464.931.291	144,20	(10,85)
Bunga Obligasi					
- Pemerintah	5.380.251.727.200	6.079.897.828.907	5.484.855.725.894	113,00	10,85
- Korporasi	2.070.214.178.316	1.500.060.305.559	1.644.893.305.509	72,46	(8,81)
Hasil Sukuk					
- Pemerintah	1.792.997.385.000	1.875.380.161.423	1.651.900.296.837	104,59	13,53
- Korporasi	156.758.333.333	8.810.939.291	9.075.000.015	5,62	(2,91)
Bunga Medium Term Notes	38.048.250.000	2.579.500.000	4.294.583.333	6,78	(39,94)
Dividen Penyertaan	-	2.205.450.000	2.301.065.000	-	(4,16)
Dividen Saham	185.807.028.699	149.810.228.011	194.043.496.174	80,63	(22,80)
Dividen Reksadana	-	55.350.768.700	53.600.394.882	-	3,27
Imbal Hasil Reksadana	237.072.696.000	136.040.019.252	132.909.526.183	57,38	2,36
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.475.700.000.000	1.063.188.181.383	1.437.178.536.569	72,05	(26,02)
Pendapatan Investasi Lainnya	-	1.333.281.110	43.200.000	-	2.986,30
Sub Jumlah Hasil Investasi	12.670.715.460.862	12.798.057.842.003	12.772.560.061.687	101,01	0,20
Peningkatan(Penurunan) Nilai Investasi					
Obligasi	200.808.780.896	(2.149.738.327.706)	5.913.611.241.490	(1.070,54)	(136,35)
Sukuk	14.632.991.000	21.943.815.242	2.125.885.599.273	149,96	(98,97)
Medium Term Notes	643.053.739	(251.976.000)	251.976.000	(39,18)	(200,00)
Reksadana	66.810.585.850	19.672.504.354	(42.238.976.490)	(29,45)	146,57
Saham	544.470.000.222	(320.945.739.928)	(672.906.766.751)	58,95	52,30
Properti Investasi	-	314.000.000	9.442.000.000	-	(96,67)
Penempatan Langsung	-	20.597.399.019	(876.662.819.540)	-	(102,35)
Sub Jumlah Peningkatan (Penurunan)	827.365.411.706	(2.408.408.325.019)	6.457.382.253.982	291,09	(137,30)
Peningkatan/Penurunan Aset Tetap					
Iuran Peserta	8.812.478.909.986	694.285.123.343	583.231.866.721	-	19,04
Penerimaan Dana Dari Pemerintah	-	8.775.090.862.137	8.925.628.769.875	99,58	(1,69)
Pendapatan Diluar Investasi	1.429.302.796.789	3.206.728.514	5.980.015.564	0,22	(46,38)
Jumlah Penambahan	23.739.862.579.342	19.862.232.230.978	28.744.782.967.829	83,67	(30,90)
2. PENGURANGAN					
Beban Investasi	8.239.562.219	29.255.670.375	50.178.453.664	355,06	(41,70)
Beban Operasional					
Beban Operasional Penyelenggaraan (BOP)					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	711.519.600.000	682.357.077.280	656.428.980.404	95,90	3,95
- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	848.385.885.209	855.509.745.499	852.399.567.738	100,84	0,36
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.506.017.657	2.340.313.337	14.514.889.753	155,40	(83,88)
- Beban Pajak	-	-	-	-	-
- Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	154.214.852.326	105.667.168.768	134.027.175.066	68,52	(21,16)
Setoran AIP untuk Penerimaan Negara	-	-	6.928.027.094.000	-	(100,00)
Bukan Pajak	-	-	91.933.092.329	-	(100,00)
- Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-
Jumlah Pengurangan	1.723.865.917.411	1.675.129.975.259	8.727.509.252.954	97,17	(80,81)
3. PENINGKATAN/PENURUNAN DANA BERSIH					
Dana Bersih Awal Tahun	22.015.996.661.931	18.187.102.255.719	20.017.273.714.875	82,61	(9,14)
Koreksi Dana Bersih	162.620.393.903.496	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	105,43	13,22
Dana Bersih Akhir Periode	184.636.390.565.427	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	102,71	10,61

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Perubahan Dana Bersih Pensiun Berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019

Lampiran 3

PT TASPEN (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
(1)	(2)	(3)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Penerimaan Bunga Deposito	1.929.955.907.601	2.177.535.378.639
- Penerimaan Bunga Obligasi	7.554.805.402.001	7.124.061.342.470
- Penerimaan Hasil Sukuk	1.789.628.616.808	1.664.614.466.148
- Penerimaan Bunga MTN	3.015.000.000	4.425.625.000
- Penerimaan Imbal Hasil Reksadana	136.040.019.252	130.487.026.183
- Penerimaan Dividen Saham	149.810.228.011	194.043.496.174
- Penerimaan Dividen Reksadana	55.824.371.370	51.705.984.203
- Penerimaan Dividen Penyertaan	2.205.450.000	2.301.065.000
- Penerimaan Sewa Properti	-	43.200.000
- Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.063.188.181.383	1.437.178.536.569
- Penanaman Investasi	(86.741.793.921.694)	(85.522.264.357.425)
- Pencairan Investasi	66.013.186.192.500	79.779.563.366.031
- Pembayaran Beban Investasi	(29.255.670.375)	(50.178.453.664)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(8.073.390.223.143)	6.993.516.675.328
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
- Perolehan Aset Bukan Investasi	(320.492.580.588)	(7.291.169.029.873)
- Penambahan (Pengurangan) Liabilitas	(52.862.040.435)	40.165.401.120
- Penambahan Pendapatan diluar Investasi	1.280.723.718.578	5.980.015.564
- Pembayaran Beban Operasional	(1.494.460.139.383)	(1.600.761.640.113)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(587.091.041.828)	(8.845.785.253.302)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Penerimaan Iuran Peserta	8.765.844.695.905	8.915.830.905.443
- Penerimaan Dana dari Pemerintah	-	-
- Pembayaran Manfaat Nilai Tunai (SP3IP)	(105.667.168.768)	(134.027.175.066)
- Setoran AIP untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	(6.928.027.094.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.660.177.527.137	1.853.776.636.377
IV KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BERSIH	(303.737.834)	1.508.058.403
V KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	2.718.913.717	1.210.855.314
VI KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	2.415.175.883	2.718.913.717

Sumber: Accounting Division

Penyajian Laporan Dana Bersih Pensiun berdasarkan PMK 169/PMK.02/2019

*Bab IV - Penutup -
Laporan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2021 (Audited)*

Lampiran 4

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN ADMINISTRATIF DANA BELANJA PENSIUN APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Rupiah

URAIAN	RKA 2021	Realisasi		% Pencapaian 2021	% Naik/Turun
		31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=3/4)
1. ASET					
Kas dan Bank					
- Kas	2.740.311	1.655.200	2.298.900	60,40	(28,00)
- Bank	666.190.839.457	709.103.982.260	629.447.478.505	106,44	12,65
Piutang Saldo Uang Pensiun	-	-	177.117.839	-	(100,00)
Piutang Kepada Pemerintah	-	254.186.998	53.240.635.530	-	(99,52)
Piutang Lain-lain	6.060.407	21.355.929	-	352,38	-
Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka	8.116.213.786.706	7.713.638.116.383	7.514.769.199.748	95,04	2,65
Manfaat Pensiun Belum Otentikasi	731.112.341.510	479.123.574.703	539.754.532.589	65,53	(11,23)
Jumlah Aset	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89
2. LIABILITAS					
Utang Manfaat Pensiun	9.129.947.627	15.097.666.832	8.257.090.500	165,36	82,84
Uta Pemerintah	7.265.562.689	45.645.964.804	27.003.540.818	628,25	69,04
Utang kepada Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS	8.116.213.786.706	7.565.311.324.300	7.363.678.773.800	93,21	2,74
Utang Kepada Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	-	12.184.400	-	-	-
Utang Potongan Penyaluran Dapem	187.457.867.983	316.304.528.765	290.538.523.834	168,73	8,87
Utang Jasa Giro	3.093.554.398	2.617.732.565	1.673.661.600	84,62	56,41
Utang Lain-lain	9.574.583	9.020.950	9.118.650	94,22	(1,07)
Jumlah Liabilitas	8.323.170.293.985	7.944.998.422.616	7.691.160.709.202	95,46	3,30
3. Sisa Dana Belanja Pensiun Tahun Lalu	1.190.355.474.406	1.046.230.553.909	1.190.355.474.406	87,89	(12,11)
4. Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan					
Penambahan					
- Penerimaan Dana Pemerintah	111.399.012.758.709	111.470.127.938.004	105.018.102.884.443	100,06	6,14
- Pendapatan Lain-lain	-	2.640	9.504	-	(72,22)
Jumlah Penambahan	111.399.012.758.709	111.470.127.940.644	105.018.102.893.947	100,06	6,14
Pengurangan					
- Pembayaran Manfaat Pensiun	111.048.830.473.752	110.625.678.456.322	104.723.380.550.548	99,62	5,64
- Pengembalian Dana Pemerintah	350.182.284.957	933.535.589.374	438.847.263.896	266,59	112,72
Jumlah Pengurangan	111.399.012.758.709	111.559.214.045.696	105.162.227.814.444	100,14	6,08
Saldo Dana Belanja Pensiun Tahun Berjalan	-	(89.086.105.052)	(144.124.920.497)	-	(38,19)
5. Sisa Dana Belanja Pensiun	1.190.355.474.406	957.144.448.857	1.046.230.553.909	80,41	(8,51)
6. Jumlah Liabilitas dan Sisa Dana Belanja Pensiun	9.513.525.768.391	8.902.142.871.473	8.737.391.263.111	93,57	1,89

Sumber: Accounting Division